

PERSEPSI ULAMA NU TENTANG SISTEM *KHILAFAH*

(Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MIFTAHUL ILMI
NIM 2103205

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008

Drs. MUSA HADI, M.Ag.
Perumahan permata merdeka
Ngalian-Semarang

Moh. Hasan, M, Ag.
Permata puri II/26
Ngalian -Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. MIFTAHUL ILMI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : MIFTAHUL ILMI
NIM : 2103205
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : PERSEPSI ULAMA NU TENTANG SISTEM KHILAFAH
(Studi Kasus Ulama Nu Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I ,

Semarang, 25 Juni 2008
Pembimbing II,

Drs. H. Musahadi, M, Ag.
NIP. 150 267 254

Moh. Hasan, M, Ag.
NIP. 150 327 105



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Miftahul Ilmi
NIM : 2103205
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **Persepsi Ulama Nu Tentang Sistem Khilafah**
(*Studi Kasus Ulama Nu Kota Semarang*)

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

28 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 04 -08 -2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

H.Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 150 279 723

Moh. Hasan, M.Ag.
NIP. 150 327 105

Penguji I,

Penguji II,

Dr.Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

Rupi'I Amri, M.Ag.
NIP. 150 285 611

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Musahadi, M, Ag.
NIP. 150 267 754

Moh. Hasan, M.Ag.
NIP. 150 327 105

MOTTO

مَنْ وَتَعِزُّ تَشَاءُ مِمَّنِ الْمُلْكُ وَتَنْزِعُ تَشَاءُ مَنِ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكُ مَالِكِ اللَّهُمَّ قُلْ
قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى إِنَّكَ الْحَيُّ بِيدِكَ تَشَاءُ مَنْ وَتُذِلُّ تَشَاءُ

“Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
(Q.S. Ali Imran [3]: 26).*

*Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H., hlm. 79.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- *Bapak dan Ibu penulis*
- *Saudara-saudara penulis*
- *Calon pendamping penulis*
- *Teman-teman penulis.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Agustus 2008

Deklarator

MIFTAHUL ILMI
NIM 2103205

ABSTRAK

Era reformasi telah membuka kembali angin segar terhadap gerakan Islam di Indonesia yang menawarkan formalisasi syari'ah, hingga penegakan *Khilafah Islamiyah* (sistem pemerintahan Islam berskala internasional). Gagasan tersebut mendapat penolakan dari NU. NU berpandangan bahwa syari'at Islam untuk dilaksanakan oleh umat Islam, bukan untuk dilegalformalkan melalui sistem *khilafah*. Bahkan NU memandang sistem *khilafah* tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Berangkat dari sinilah penulis tertarik melakukan penelitian terhadap persepsi ulama NU tentang sistem *khilafah*, dengan mengambil lokasi ulama NU Kota Semarang.

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui persepsi Ulama NU Kota Semarang terhadap sistem *Khilafah*. 2) Untuk mengetahui nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilafah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; Jenis penelitian adalah penelitian lapangan(*field research*) dan bersifat eksploratif. Lokasi penelitiannya di Kota Semarang, dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut ulama NU Kota Semarang *khilafah* merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama. Sistem *khilafah* tersebut tidak pas diterapkan di Indonesia, bahkan sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang. Sebab negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim sudah mapan dengan *nation state*. Meskipun sistem *khilafah* ideal karena dapat mempersatukan dunia Islam, tetapi sulit diwujudkan atau sebagai konsep ideal utopis. Menurut ulama NU Kota Semarang, Islam tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem *khilafah*. Tidak terdapat satu pun ayat al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan *khilafah*. Yang diperintahkan oleh Islam adalah mendirikan *imamah* (kepemimpinan), dan *imamah* bentuknya tidak harus *khilafah*, tetapi disesuaikan dengan situasi dan perkembangan politik yang ada sehingga relevan. Nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak didirikannya sistem *Khilafah Islamiyah* bahwa dalam menjalankan ajaran Islam yang lebih dipentingkan adalah melihat tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), dari pada ketentuan-ketentuan harfiah syari'at Islam. *Maqashid al-syari'ah* merupakan semangat dasar terbentuknya syari'at yang ditujukan untuk mengedepankan *maslahat*, dan menghindari *madharat*. Penegakan *Khilafah Islamiyah* justru akan banyak menimbulkan *madharat*. Semua tatanan yang sudah ada di negara-negara muslim akan dirombak, dan pasti akan menimbulkan kekacauan. Pola keagamaan yang telah berlangsung selama ini di Indonesia telah memenuhi keperluan untuk menjalankan syari'at Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Dosen Pembimbing I, Drs. Musa Hadi, M.Ag., dan dosen Pembimbing II, Muhammad Hasan, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Kepada pengurus NU Kota Semarang yang berkenan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi sebagai data penelitian, dan juga kepada ulama NU Kota Semarang yang berkenan penulis wawancarai guna memperoleh data. Semoga Allah membalas amal baik dan keikhlasan mereka.
5. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
6. Para karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai Perpustakaan IAIN, pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pegawai Perpustakaan TPM yang telah memberikan layanan dengan baik dan ramah kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik materiil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.
8. Saudara-saudara penulis, dan orang-orang dekat penulis yang ikut memberi dorongan dan do'a.

9. Buat dinda "Amara" atas semua kasih sayang dan perhatianmu yang membuatku pantang menyerah dalam menjalani dinamika hidup. Semoga sang Khalik mengamini semua visi dan misi yang pernah kita ikrarkan bersama, *ielna 4 ever*.
10. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di lingkungan Cabang Semarang dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) kota Semarang, salam perjuangan !!! **YAKIN USAHA SAMPAI**. dan terima kasih juga kepada kanda dan yunda KAHMI yang memberikan pencerahan, inspirasi dan motivasinya dalam mencapai sebuah kesuksesan.
11. Pak Solikhin dan keluarga besar Perguruan Silat Sari Cempaka Putih (SCP) semoga terus eksis dan bisa menghasilkan pendekar-pendekar tangguh yang bermoral mulia.
12. Teman-teman penulis yang ikut memberikan motivasi selama menempuh studi, mas irwan, mas havis, cucok ali, haji bambang, tajir, ali, jatno, alvy, dll. kawan2 posko KKN Mojo Agung, dan kawan-kawan paket SJ angk 2003 yang is the best.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 4 Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHILAFAH</i>	
A. Pengertian <i>Khilafah</i>	16
B. Dasar-dasar Hukum <i>Khilafah</i>	19
C. Pandangan Ulama tentang <i>Khilafah</i>	24
BAB III PERSEPSI ULAMA NU KOTA SEMARANG TENTANG SISTEM <i>KHILAFAH ISLAMIAH</i>	
A. Profil NU Kota Semarang	36
B. Corak Fahaman Keagamaan NU	43
C. Visi Kebangsaan NU	46

	D. Persepsi Ulama NU Kota Semarang tentang Sistem <i>Khilafah Islamiyah</i>	54
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERSEPSI ULAMA NU KOTA SEMARANG TENTANG SISTEM <i>KHILAFAH ISLAMIYAH</i>	
	A. Analisis terhadap Persepsi Ulama NU Kota Semarang tentang Sistem <i>Khilafah Islamiyah</i>	66
	B. Nalar Epistemologi Ulama NU Kota Semarang dalam Menolak Sistem <i>Khilafah Islamiyah</i>	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-saran	81
	C. Kata Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya Baghdad pada pertengahan abad XIII M. akibat serangan bangsa Mongol menandai berakhirnya masa kejayaan Islam. Sejak saat itu, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis, bahkan wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu dengan yang lain saling bermusuhan bahkan saling memerangi.¹ Baru pada abad XVI M. muncul tiga kerajaan besar yang menggantikan posisi Dinasti Abbasiyah. *Pertama*, Turki Usmani yang bermadzhab *Sunni*, di Turki. *Kedua*, Safawi yang bermadzhab *Syiah* di Persia, dan terakhir Mughal yang bermadzhab *Sunni* di Anak Benua India. Diantara tiga kerajaan tersebut, Turki Utsmani yang terbesar dan paling lama bertahan bahkan kekuasaannya meliputi kawasan Timur Tengah dan bagian Timur Benua Eropa. Namun Kerajaan Turki Utsmani yang dipandang sebagai khalifah dan pemerintahan Islam sedunia tidak dapat mempertahankan eksistensinya. Ia dibubarkan pada bulan Maret 1924 setelah pembentukan Negara nasional sekuler Republik Turki yang dipelopori oleh *Kemal Attaturk*. Dengan demikian institusi yang dipandang sebagai lambang supremasi politik Islam lenyap.²

¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet. XIII, hlm. 129.

²Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet. II, hlm. 2.

Kehancuran *khilafah* Utsmani telah membuat umat Islam kehilangan wibawa kekuasaan di mata dunia, umat Islam yang dulu jaya dan menjadi imam peradaban kini harus menjadi anak yatim yang selalu di perlakukan dengan tidak adil. Kaum muslimin yang kehilangan payung *khilafah* kini menjadi manusia-manusia paling miskin harkat dan derajatnya, hati mereka berkeping, pikiran mereka terpecah oleh adanya sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan nasionalisme di mana Islam bukan lagi sebagai perekat utama bagi kehidupan mereka.³

Menurut Munawir Sjadzali penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan besar pasca kerajaan Abbasiyah seperti Turki Utsmani lebih disebabkan oleh disintegrasi politik dengan melemahnya otoritas di masing-masing pemerintah pusat dan munculnya penguasa semia otonom di berbagai daerah dan propinsi negara-negara tersebut, disertai dengan dislokasi sosial, memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan dagang dengan negara-negara Eropa, kalah perang, serta merosotnya spiritualitas dan moralitas masyarakat, terutama para penguasa.⁴

Sejak saat itu pula kaum muslimin di berbagai Negara di dunia selalu berusaha menemukan kembali serta membangun kembali sistem politik Islam. Paling tidak mempengaruhi pemerintahnya masing-masing untuk memberi kesempatan kepada umat Islam melaksanakan Islam sebagai jalan hidupnya.⁵

³Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniah*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. xix

⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Edisi 5, Jakarta: PT. UI Press, 1993, hlm. 111.

⁵Mohamed S. El-Wa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thajib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, hlm. 12.

Seperti ide pembentukan kembali Negara *khilafah* yang diprakarsai oleh Hasan al-Banna dengan mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Namun, gerakan-gerakan tersebut dimusuhi dan ditekan oleh penguasa-penguasa, bahkan di negara-negara Islam sendiri.⁶

Gerakan tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak pro dan kontra bermunculan menyikapi isu yang di usung oleh gerakan tersebut. Belakangan, wacana sistem *khilafah* dijadikan agenda utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari Hizbut Tahrir yang berskala internasional. Puncaknya diadakan acara Konferensi *Khilafah* Internasional di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2007. Menurut HTI, ”bahwasanya problematika utama yang menimpa kaum Muslimin saat ini disebabkan tidak diterapkannya hukum-hukum Islam di tengah masyarakat. Satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem dan hukum-hukum Islam secara total di tengah-tengah masyarakat hanyalah *khilafah al Islamiyah*.⁷

Gagasan HTI tersebut mendapat penolakan khususnya dari Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama, dua ormas terbesar di Indonesia dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila yang dihuni oleh berbagai macam ragam budaya. Indonesia juga bukan negara yang berideologi Islam.⁸

⁶*Ibid.*

⁷Http:// www.Hizbut-Tahrir.or.id., diakses Tanggal 15 Februari 2008, pukul 20.10 WIB

⁸Http:// www.nu.or.id., diakses Tanggal 20 Februari 2008, pukul 19.20 WIB

Sejak dibubarkannya sistem *khilafah* di Turki sebenarnya sudah muncul perbedaan pendapat di kalangan para pemikir maupun aktivisi politik Islam saat itu, tentang perlu atau tidak menegakkan kembali sistem *khilafah*. Sebab, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum wajib didirikannya *khilafah* ternyata hanya berbicara tentang perlunya kepemimpinan. Harus dibedakan antara kepemimpinan seperti yang dikehendaki oleh al-Qur'an maupun hadits dengan *khilafah* seperti yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok yang mewajibkan ditegakkannya kembali sistem *khilafah*.⁹

Demikian halnya sinyalemen yang ditunjukkan ulama NU di Kota Semarang. Mereka menolak sistem *khilafah* seperti yang diwacanakan oleh HTI diterapkan di Indonesia. Sebab, baik kultur maupun sistem kenegaraan di Indonesia yang berbentuk NKRI tidak memungkinkan untuk diterapkannya sistem *khilafah*. Penolakan ini sejalan dengan keputusan yang diambil oleh NU secara organisatoris yang telah menegaskan bahwa NKRI berdasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan NU.¹⁰

Seperti dikemukakan oleh salah seorang ulama NU Kota Semarang, KH. Ubaidillah Shadaqoh, SH, bahwa sistem *khilafah* merupakan sistem lama meskipun ideal, tetapi tidak mungkin dapat diterapkan lagi. Tidak mungkin dengan kondisi politik sekarang di mana negara-negara Islam maupun yang berpendudukan mayoritas Islam sudah sangat mapan eksistensinya dan dijamin

⁹Muslih Shabir, "*Khilafah Islamiyah*", dalam *Suara Merdeka*, Semarang, Kamis 21 Februari 2008, hlm. 3.

¹⁰Wawancara pra-penelitian dengan KH. Ubaidillah Shadaqoh, SH, pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2008, Pukul 16.30-15.30 di rumahnya.

oleh PBB, akan dengan suka rela meleburkan diri ke dalam negara lain. Ide pendirian *khilafah Islamiyah* jelas tidak realistis.¹¹

Memang, NU dengan visi kebangsaannya bersikap tegas menolak gagasan negara Islam, formalisasi syari'ah, apalagi mendirikan *khilafah Islamiyah*. Ulama NU berpandangan bahwa syari'at Islam itu untuk dilaksanakan oleh umat Islam dan tidak untuk dilegalformalkan dalam kehidupan kenegaraan, apalagi melalui sistem *khilafah* yang tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Namun demikian, penolakan ini tentu ada faktor yang mempengaruhi.

Berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang persepsi ulama NU tentang konsep *khilafah* dengan mengambil lokasi ulama NU di Kota Semarang. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi ulama NU hingga mereka menolak sistem *khilafah* diterapkan di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana persepsi ulama NU Kota Semarang terhadap sistem *khilafah*?
2. Bagaimanakah nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilafah*?

¹¹*Ibid.*

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Ulama NU Kota Semarang terhadap sistem *khilafah*.
2. Untuk mengetahui nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilafah*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait dengan NU, pandangan ulama NU, maupun tentang *khilafah* telah banyak dilakukan. Hasil penelitian tersebut cukup membantu untuk dijadikan sebagai acuan/referensi. Berikut di antara tulisan atau hasil penelitian yang penulis jadikan acuan.

Rozikin Daman dalam bukunya, *Membidik NU; Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* mengupas tentang dinamika organisasi NU pasca kembali ke Khittah 1926. NU menampilkan dua wajah yang berbeda dalam setiap gerak sosial politiknya, di satu sisi sebagai organisasi sosial keagamaan murni dengan peran ulamanya yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Namun di sisi lain, para politisi NU tetap memainkan peran politiknya dengan tetap di bawah bayang-bayang kebesaran NU untuk mendapatkan legitimasi dari ulama dan masa pendukungnya, dan pada saat bersamaan kalangan pembaharuan NU yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan roda

organisasi, berusaha mencari jalan tengah di antara berpolitik praktis dan a-politik, dengan gerakan politik kulturalnya.¹²

M. Ali Haidar dalam tesisnya yang diterbitkan, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik* mengilustrasikan perilaku politik NU ditinjau dari pandangan fiqh, yakni pertimbangan maupun logika politik NU yang selalu dilakukan tidak terlepas dari kaidah-kaidah fiqh. Sikap tersebut tercermin ketika NU menyatakan bahwa Indonesia adalah negara muslim (*dar al-Islam*), walaupun pada saat itu Indonesia dikuasai oleh penjajah Belanda, kemudian berlanjut dengan adanya pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah Negara Indonesia dengan sebutan *Waliyyu al-amr al-daruri bi al-syaukah*. Tahap akhir dari sikap NU ini adalah pengakuan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan konsistensi NU dalam mengaplikasikan konsep-konsep fiqh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Negara di Indonesia.¹³

Zudi Setiawan dalam bukunya *Nasionalisme NU*, membahas tentang kiprah NU dalam membela NKRI dengan semangat nasionalismenya. Buku ini juga menyebutkan dengan mengungkap nilai-nilai Aswaja, NU dapat memposisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berwatak kebangsaan. Watak kebangsaan tersebut sebenarnya melekat pada sejarah dan jati dirinya. Kiprahnya juga semakin termanifestasi dengan bentuk toleransi dalam kehidupan beragama.

¹²Rozikin Damam, *Membidik NU, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, cet. I, hlm. 239-240.

¹³M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 319-321.

Buku ini juga menyebutkan sejarah NU dalam menolak pendasaran negara pada Islam.¹⁴

Mukharom dalam skripsinya "Pandangan Ulama NU Kota Semarang tentang Wakaf Tunai (*Cash Wakaf*)" mengemukakan bahwa menurut Ulama NU Kota Semarang, wakaf tunai/dengan uang tidak sah. Sebab wakaf dengan uang tunai barangnya tidak kekal dan habis pakai. Sebab uang tunai dari segi fisiknya memang akan berubah ketika dimanfaatkan. Wakaf dengan uang hukumnya menjadi shadaqah biasa, sehingga nadzhir yang menerimanya tidak mempunyai tanggung jawab *waqfiyah* apalagi pemanfaatannya sudah sesuai amanat si pemberi.¹⁵

Sedangkan yang berkaitan dengan sistem *khilafah*, penulis ilustrasikan buku-buku berikut; Abdullah Azzam melakukan elaborasi dalam bukunya *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, bahwa beberapa perkara yang dapat menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia yaitu *Khilafah*, Ka'bah, Masjid Nabawi, dan *Jihad fi sabilillah*. Orang-orang Barat (non muslim) berupaya untuk meruntuhkan *khilafah* karena keberadaan *khilafah* bagi kaum muslimin adalah ibarat menara api yang memberikan lentera penerang di malam gelap gulita. Sehingga semua orang berkumpul di sekelilingnya.¹⁶ Upaya untuk menegakkan kembali kekhalifahan Islam pertama kali dilakukan oleh Ikhwanul

¹⁴Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 20007, hlm. 92-103.

¹⁵Mukharom, "Pandangan Ulama NU Kota Semarang tentang Wakaf Tunai (*Cash Wakaf*)", Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007, hlm. 73-74. td.

¹⁶Abdullah Azzam, *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Terj. Abdurrahman, Solo: Pustaka Al-Alaq, 1994, cet. I, hlm. 19.

Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 M. yang hingga saat ini belum berhasil.¹⁷

Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Khalifah dan Pemerintahan Islam*, mempertanyakan dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola *khilafah* merupakan keharusan agama. Apabila ditinjau dari segi agama maupun rasio, pola pemerintahan *khilafah* itu tidak relevan. Raziq membedakan antara misi kenabian dengan pemerintahan. Misi kenabian bukanlah pemerintahan dan agama itu bukan negara dan harus dibedakan mana yang Islam dan mana yang Arab, mana yang agama dan mana yang politik. Raziq tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan *khilafah* merupakan suatu kewajiban, dan tidak ada satupun dasar yang mewajibkan itu, baik al-Qur'an, hadits maupun ijma'. Raziq berpendapat bahwa dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau mereka yang tidak beragama sekalipun. Penguasa itulah pemerintah. Namun pemerintah itu tidak harus berbentuk khalifah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, apakah republik atau diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi baik bentuk maupun sifatnya tidak harus satu, khalifah, dan boleh beragam.¹⁸

¹⁷*Ibid.* hlm. 45.

¹⁸Ali Abd al-Raziq, *Khalifah dan Pemerintahan Islam*, terj. Afif Mohammad, Pustaka, Bandung, 1985, hlm. 34-53.

Dhiyauddin Rais dalam bukunya *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Islam, Ali Abdur Raziq*, mengcounter pendapat Ali Abdur Raziq di atas. Dhiyauddin menyatakan tentang kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh Ali Abdur Raziq dalam memahami konsep *khilafah*. Pandangan Razik yang keliru memandang konsep *khilafah* bertujuan menghancurkan kekhalifahan Islam karena sejalan dengan agenda politik Inggris waktu itu yaitu menjatuhkan kekhalifahan Utsmani, menghancurkan kekhalifahan, dan menyatakan bahwa dalam agama Islam tidak terdapat ajaran tentang *khilafah*, jihad, dan perang.¹⁹

Ali al-Salus dalam bukunya, *Imamah & Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*, mengemukakan bahwa di kalangan kaum muslimin masih terdapat perbedaan pemahaman tentang masalah *imamah* dan *khilafah*. Penafsiran berbagai kelompok muslim tentang konsep ini seringkali di pengaruhi oleh keyakinan dan kepentingan politik masing-masing. Oleh karena itu, perselisihan terbesar di antara umat Islam di latar belakang oleh masalah *khilafah* (Imamah).²⁰

Berdasarkan deskripsi di atas, nampaklah belum secara spesifik membahas tentang persepsi ulama NU tentang konsep *khilafah* secara khusus. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian persepsi ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah*. Dengan penelitian ini akan diketahui nalar epistemologis dan faktor apa yang mempengaruhi pandangan ulama NU tersebut.

¹⁹Dhiyauddin al-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Islam, Ali Abdur Raziq*, Terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985 cet. I, hlm. viii-ix.

²⁰Ali al-Salus, *Imamah & Khilafah dalam Tinjauan Syari'*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1997, cet. I, hlm. 11.

E. Metode Penelitian

1. Jenis, Lokasi, dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(*field research*) dan bersifat eksploratif yaitu berupa penjelajahan pandangan/persepsi ulama NU Kota Semarang tentang sistem *Khilafah Islamiyah* yang datanya diperoleh dari data lapangan²¹. Lokasi penelitiannya di Kota Semarang. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis. Pendekatan fenomenologi adalah upaya mencari berbagai perspektif, serta apa-apa yang dapat dipahami dari realitas yang terkandung dalam ajaran agama yang esensial.²² Fenomenologis juga dimaksudkan untuk memberikan suatu pandangan menyeluruh dari ide-ide dan motif-motif yang kepentingannya sangat menentukan persepsi. Pendekatan fenomenologis ini penulis gunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang tampak dari keberagamaan ulama-ulama NU Kota Semarang dalam memandang sistem *khilafah*, sehingga akan diketahui alasan dibalik penolakan mereka terhadap sistem *khilafah*.

3. Sumber Data

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah persepsi ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah* yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan pengurus struktural NU Kota Semarang yang terdiri atas pengurus

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. XII, hal, 10

²²Peter Conolly, *Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002, cet. I, hlm. 153.

Syuriah (Drs, KH. A. Hadlor Ihsan), Tanfidziyah (Drs. H. Anashom, M.Hum), dan Mustasyar (KH. Siroj Khudlori), juga dengan ulama NU non struktural khususnya seperti KH. Haris Shodaqoh, KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH, dan dengan Prof. Dr. H. Muslih Shabir, M.A. Keempat element NU tersebut penulis pandang cukup mewakili ulama NU Kota Semarang secara keseluruhan. Perlu dikemukakan, karena penelitian ini bersifat eksploratif, maka tidak dibatasi oleh jumlah informan, namun peneliti berupaya menggali data sebanyak-banyaknya untuk dipilah yang sesuai. Sedangkan data sekundernya merujuk pada sumber-sumber pendukung teori tentang *khilafah*, profil NU Kota Semarang, pandangan politik dan keagamaan NU, dll., yang diperoleh dari sumber literatur/tertulis seperti buku, majalah, koran, maupun dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu:

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara adalah tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²³

Wawancara berisi pertanyaan yang berhubungan dengan sistem *khilafah*, apakah sistem *khilafah* wajib diterapkan, bagaimana jika diterapkan di Indonesia, mengapa NU menolak diterapkannya sistem *khilafah*,

²³ *Ibid.*, hlm. 135.

bagaimana sebenarnya yang dimaksud pemerintahan Islam menurut NU, dan lain-lain.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis, artifack, film, dll. yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa atau pemikiran.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil NU di Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penyajian data guna menjelaskan suatu pemikiran atau fakta apa adanya.²⁵ Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pandangan ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah* yang penulis uraikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya akan diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.²⁶

Sedangkan kualitatif penulis lakukan dengan pertimbangan; *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini mendekatkan secara langsung hakikat

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 61.

²⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 18.

²⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68-69.

hubungan antara peneliti dengan informan. *Ketiga*, kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁷ Oleh karena itu, pola kualitatif ini lebih tepat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sebab data yang penulis gali adalah melalui wawancara.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum tentang *Khilafah*. Bab ini memuat tentang pengertian *khilafah*, dasar-dasar hukum *khilafah*, pandangan ulama tentang *khilafah*.

Bab III Persepsi Ulama NU Kota Semarang Terhadap Sistem *Khilafah*. Bab ini memuat tentang Profil Organisasi NU Kota Semarang, corak faham keagamaan NU, visi kebangsaan NU, dan persepsi ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah*.

Bab IV Analisis. Bab ini memuat dianalisis terhadap persepsi Ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah*, dan nalar epistemologis yang digunakan NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilafah*.

²⁷Lexy J. Muleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 5.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHILAFAH*

A. Pengertian *Khilafah*

Secara bahasa, kata *khalifah* merupakan bentukan dari *mashdar takhallafa*, artinya mengikuti. Seseorang dikatakan mengikuti (*takhallafa*) jika ia berada di belakang orang lain, mengikuti di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Tidak hanya itu, seseorang disebut menggantikan orang lain apabila ia melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu kepadanya, baik bersama-sama orang tersebut maupun sesudahnya.¹ Pengertian ini merujuk pada Q.S. al-Zuhruf [43] ayat 60:

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

”Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat yang turun-temurun” (Q.S. al-Zuhruf [43]: 60).²

Khalifah adalah pengganti orang lain, baik karena absennya orang yang digantikan itu karena meninggal, ketidakmampuan, maupun alasan-alasan lain. Bentuk jamak dari *khalifah* adalah *khalaiif*, dan *khulafa* untuk *khalif*.³

Adapun pengertian *khilafah* yang berlaku di kalangan para ulama disinonimkan dengan istilah *al-imamah* (kepemimpinan), yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persolan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan

¹Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 3.

²Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H., hlm. 802.

³Raghib al-Ishfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 105.

duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah S.a.w. Menurut al-Baidhawi seperti dikutip Ali Abdul Raziq "imamah adalah istilah yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syari'ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat".⁴

Ibn Khaldun mendefinisikan; "khalifah adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syara' yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi dan duniawi bagi umat. Hakikatnya khalifah merupakan pengganti fungsi pembuat syara' (Rasulullah S.a.w.) dalam upaya memelihara persoalan agama dan politik keduniawian".⁵

Al-Maududi menyebutkan bahwa doktrin tentang *khilafah* yang disebutkan al-Qur'an ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini hanyalah karunia dari Allah, dan Allah telah menjadikan manusia dapat menggunakan pemberian-pemberian sesuai petunjuk-Nya. Berdasarkan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Allah yang sebenarnya.⁶ Selanjutnya, al-Maududi menyebutkan bahwa Islam menggunakan istilah kekhalifahan bukannya kedaulatan. Karena dalam Islam kedaulatan hanya milik Tuhan saja, siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan dan siapa pun yang memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dari penguasa tertinggi dan tidak akan berwenang

⁴ Ali Abdul Raziq, *op.cit.*, hlm. 4.

⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. II, 2000, hlm. 238.

⁶ Abu al-A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. M. al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984, hlm. 64.

mengerahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.⁷

Sedangkan Taqiyuddin al-Nabhani menyebutkan *khilafah* merupakan satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Taqiyuddin mendefinisikan hilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem *khilafah* sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, seperti monarchi, republik, kekaisaran, maupun federasi, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. *Khilafah* juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.⁸

Menurut pandangan sebagian ulama, khalifah adalah pengganti fungsi Rasulullah S.a.w. yang di saat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterimanya dari Allah SWT, dan bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus persoalan politik keduniaan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah S.a.w. wafat, para khalifah pun menjadi penggantinya dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan urusan politik keduniaan. Orang yang melaksanakan fungsi itu pun disebut *khaliqah* atau imam. Disebut dengan imam

⁷Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 169.

⁸Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Dar al-Umah, 1996, hlm. 18.

karena disepadankan dengan kedudukan seorang imam shalat dalam hal kepemimpinan dan mesti diikuti.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *khilafah* di sini adalah sebuah sistem pemerintah Islam sebagai pengganti Rasulullah S.a.w. dalam fungsinya menerapkan syari'at Islam dan mengurus persoalan politik keduniaan. Sistem *khilafah* juga berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya dilihat dari dasar, standar, konsep maupun fungsinya.

B. Dasar-dasar Hukum *Khilafah*

Dasar hukum yang digunakan ulama yang mewajibkan berdirinya *khilafah* dalam pengertian *imamah* (kepemimpinan) adalah al-Qur'an, hadis, ijma', dan logika. Namun jika diperhatikan secara seksama, tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menjelaskannya secara rinci. Misalnya Q.S. al-Nisa' [4] ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Nisa' [4]: 59)¹⁰

Selain itu juga Q.S. al-Nisa' [4] ayat 83:

⁹Ali Abdul Raziq, *op.cit.*, hlm. 5.

¹⁰Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 128.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:

”Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (Q.S. al-Nisa’ [4]: 83)¹¹

Kandungan kedua ayat di atas adalah tentang perlunya pemimpin untuk dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tidak terdapat kandungan makna *khilafah* secara langsung dalam kedua ayat di atas. Hanya saja, kata *uli al-amr* yang terdapat dalam ayat di atas menurut para mufasir sebagai para pemimpin kaum muslimin pada masa Rasulullah S.a.w. dan masa sesudahnya termasuk para *khulafa’ al-rasyidun*, hakim-hakim, para pemuka masyarakat, para ulama atau *ahl hal wa al-aqd*.¹²

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, Islam telah memerintahkan umat Islam agar mendirikan sebuah sistem pemerintahan dan mengangkat seorang *khilafah* yang memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam.¹³ Perintah ini berdasarkan ayat:

... فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...

¹¹*Ibid.*, hlm. 132.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Volume 2, Jakarta: Lintera Hati, Cet. VIII, 2007, hlm. 484.

¹³Taqiyuddin al-Nabhani, *loc.cit.*

Artinya:

“... Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (Q.S. al-Maidah [5]: 48).¹⁴

Pemerintahan atau *al-hukm* merupakan kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Pemerintahan merupakan aktivitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin. Aktivitas ini dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan seperti yang disebutkan dalam ayat:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ...

Artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ...”. (Q.S. al-Maidah [5]: 49).¹⁵

... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya:

“... Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir”. (Q.S. al-Maidah [5]: 44).¹⁶

Menurut Taqiyuddin, Islam sebagai ideologi bagi negara, telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang integral dengan eksistensinya. Islam telah memerintahkan pemeluknya agar mendirikan negara dan pemerintahan, yang memerintah berdasarkan hukum-hukum syara'. Sebab

¹⁴Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 168.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 167.

para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Menurutnya, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem bagi Daulah Islam. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam.¹⁷

Sedangkan hadis-hadis yang dijadikan pijakan tentang kewajiban mendirikan *khilafah* seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash:

ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع, فان جاء اخر ينازعه
فاضربوا عنق الآخر.¹⁸

Artinya:

“Siapa saja yang membai’at (satu) Imam, memberikan uluran tangan (bai’atnya) dan buah hatinya (untuk mengikuti perintahnya), maka hendaknya dia mentaatinya. Apabila datang orang lain yang ingin mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah lehernya”. (H.R. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Arfajah:

من أتكم وامركم جميع على رجل واحد, يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم,
فاقتلوه.¹⁹

Artinya:

“Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan urusan kailian ditangani (diatur) oleh seorang khalifah, kemudian dia hendak memecah belah kesatuan umat (jamah’ah kalian), maka perangilah dia”. (H.R. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

¹⁷ Taqiyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 20.

¹⁸ Abi Husein Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hajm, 2002, hlm. 824.

¹⁹ *Ibid.*

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.²⁰

Artinya:

“Dan siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at (kepada khalifah), maka ia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah”. (H.R. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكروه, وان لا تنزع الامر اهلله, وان تقوم او نقول بالحق حيثما كنا, لا نخاف في الله لومة لائم.²¹

Artinya:

“Kami telah membai’at Rasulullah S.a.w. untuk mentaati dan mendengarkan setiap perintahnya, baik waktu senang atau susah dan kami tidak akan mengambil kekuasaan dari yang berhak dan akan mengatakan yang hak di mana pun kami berada. Tidak takut (karena Allah) akan celaan orang-orang yang mencela” (H.R. Bukhari).

Semua hadis ini menjelaskan tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Tidak dibenarkan kaum muslimin mempunyai lebih dari satu orang pemimpin. Berdasarkan hadis-hadis ini, mengharuskan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak membolehkan dalam satu bidang tersebut ada pemimpin lebih dari satu orang. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan kepemimpinan kolektif (kelompok). Kepemimpinan yang ada dalam Islam adalah tunggal.²²

Selain ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, umumnya para ulama yang mewajibkan adanya *khilafah*, mendasarkan pada *ijma'*, dan logika. Ibn Khaldun menyatakan; hampir tidak dapat ditemukan adanya orang yang berpendapat

²⁰Abi Husein Muslim bin al-Hajaj, *op.cit.*, hlm. 831.

²¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hazm, 2002, hlm. 1329.

²²Taqiyyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 126.

tentang tidak wajibnya *khilafah* ini, baik secara logika maupun syar'i. Wajib di sini berarti pelaksanaan hukum syara'. Apabila umat secara menyeluruh telah mampu merealisasi keadilan dan melaksanakan syari'at Islam, maka tidak perlu lagi ada seorang imam dan fungsi *khilafah*.²³

Ijma' yang dijadikan pijakan adalah bahwa begitu Rasulullah S.a.w. wafat, para sahabat segera memberikan bai'atnya kepada Abu Bakar r.a. dan menyerahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian pula yang terjadi pada masa-masa sesudah itu, dan umat Islam tidak pernah dibiarkan kacau tanpa pemimpin meski hanya sesaat.²⁴

Menurut Taqiyuddin, ijma' sahabat telah sepakat tentang sistem *khilafah*, kesatuan *khilafah*, kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at selain kepada satu Khalifah. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumhur fuqaha.²⁵

Sedangkan dasar logika adalah dengan adanya fungsi seorang imam, maka perintah-perintah al-Qur'an yang berkenaan dengan urusan ummat seperti amar ma'ruf nahi munkar, yang wajibnya hukumnya dapat dilaksanakan dengan mudah. Tanpa fungsi seorang imam, kedua kewajiban itu sulit direalisasikan. Apabila tidak seorang imam, rakyat tidak mungkin dapat diorganisir, bahkan akan muncul pertentangan, merajalela kezaliman, dekadensi, dan sikap permusuhan yang sudah menjadi watak manusia.²⁶

²³ Ibn Khaldun, *loc.cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Taqiyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, hlm.35.

²⁶ Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan ...*, *op.cit.*, hlm. 111-115.

Adapun tentang pengangkatan Khalifah adalah dengan cara bai'at dari kaum muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) atas dasar al-Qur'an dan Hadis. Bai'at ialah sumpah janji setia yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menta'ati seseorang sebagai pemimpin dalam melaksanakan syari'at Islam.²⁷

Kedudukan bai'at sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditegaskan oleh bai'at kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi S.a.w., dan para Khulafa' al-Rasyidun. Bai'at umat Islam kepada Rasulullah S.a.w. maupun Khulafa' al-Rasyidun, bukanlah bai'at atas kenabian, melainkan bai'at untuk melaksanakan perintah, bukan untuk mempercayai kenabian. Nabi dibai'at dalam kapasitas sebagai kepala negara bukan sebagai Nabi dan Rasul. Sebab pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan itu adalah persoalan kaimanan, bukan persoalan bai'at.²⁸

Cara-cara praktis (teknis) operasional sebelum dibai'atnya Khalifah, atau dalam memilih Khalifah sebelum dibai'at, dapat ditempuh berbagai cara misalnya cara yang pernah ditempuh oleh Khulafa' al-Rasyidun, ataupun cara lain seperti pemilihan langsung. Sebab, terkait dengan teknis operasional tidak ada satu cara tertentu yang mengikat. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing *Khulafa' al-Rasyidun* menggunakan teknis yang berbeda satu sama lain. Setiap pemerintahan maupun kekuasaan yang berdiri atas dasar sistem *Khilafah* atau yang di dalamnya berlaku pengangkatan khalifah dengan cara bai'at dan

²⁷ Taqiuddin al-Nabhani, *Nidham al-Hukm ...*, *op.cit.*, hlm. 75

²⁸ *Ibid.*

menjalankan sistem (hukum) dengan apa yang telah Allah turunkan, maka pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Islam.²⁹

Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq, baik al-Qur'an, hadis, maupun ijma', yang berbicara tentang bai'at, hukm (pemerintahan), atau perintah untuk menaati uli al-amr, arahnya bukan perintah untuk mendirikan *khilafah*. Perintah untuk bai'at, atau menaati uli al-amr, sama sekali bukan berbicara tentang teori imamah, dan bukan kewajiban agama. Juga tidak berarti Allah telah menetapkan hukum tertentu bagi masalah-masalah imamah. Sedangkan ijma' merupakan sesuatu yang sulit dicari sandarannya dan keotentikannya.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dasar hukum *khilafah* adalah al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, dan alasan logika. Namun demikian, baik ayat-ayat al-Qur'an, hadis, maupun ijma' di atas masih diperdebatkan oleh para ulama tentang keterkaitannya dengan pembentukan *khilafah*.

C. Pandangan Ulama tentang *Khilafah*

Kebanyakan ulama klasik dan pertengahan pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan lagi keabsahan sistem *khilafah* yang mereka temukan pada zamannya; apakah dengan seorang khalifah yang dipilih seperti zaman *khulafa al-rasyidun*, atau raja/sultan memerintah atas dasar turun-temurun dengan gelar khalifah, apakah bentuk negaranya supra nasional, dan dengan kekuasaan yang mutlak atau hampir mutlak. Mereka tidak cukup besar perhatiannya terhadap cara bagaimana khalifah naik tahta, apakah dengan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁰ Ali Abdul Raziq, hlm. 19-30.

pengangkatan, penunjukkan atau pemilihan. Apalagi sampai berpolemik, apakah mendirikan *khilafah* itu wajib atau tidak. Perbedaan pendapat tentang sistem *khilafah* terjadi di kalangan ulama kontemporer.

Sarjana Islam pertama yang menuangkan teori politiknya dalam suatu karya tulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Abi Rabi' yang hidup di Baghdad semasa pemerintah Mu'tashim abad IX Masehi. Kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun. Mereka inilah yang kiranya dianggap cukup untuk mewakili pemikiran politik Islam pada zaman klasik dan pertengahan.

Ibn Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia satu sama lain saling memerlukan, kemudian berkumpul dan menetap di suatu tempat. Dari proses ini maka tumbuh kota-kota yang pada akhirnya membentuk pemerintahan (negara). Setelah timbul negara maka timbul masalah, siapakah pengelola negara itu, yang memimpinnya, mengurus segala permasalahan rakyatnya. Ibn Abi Rabi' memilih sistem monarki di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal dari sekian banyak bentuk pemerintahan yang ada. Untuk urusan agama, Ibn Abi Rabi' mengatakan bahwa Allah telah memberikan keistimewaan kepada raja dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya, dan mempercayakan hamba-hamba-Nya kepada mereka.³¹

Adapun al-Mawardi yang terkenal dengan perumus konsep imamah, menyatakan bahwa imamah diperlukan karena alasan; pertama adalah untuk merealisasi ketertiban dan perselisihan. Menurut al-Mawardi, kata *ulil amri*

³¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hlm. 46-47.

dalam al-Qur'an adalah imamah (kepemimpinan). Lebih dari itu, dalam karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* al-Mawardi mengemukakan bahwa imamah atau khalifah adalah penggantian posisi Nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Secara tersirat bahwa bentuk negara yang ditawarkan Al-Mawardi lebih kepada teokrasi, menjadikan agama dan Tuhan sebagai pedoman dalam bernegara. Bahwa pemerintahan merupakan sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaannya pun berdasar dan dibatasi oleh kekuasaan Tuhan.³²

Sejalan dengan al-Mawardi, al-Ghazali mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan dalam islam adalah teokrasi. Sebab, kekuasaan kepala negara tidak datang dari rakyat, melainkan dari Allah. Al-Ghazali berdalil kepada al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 26 yang menyatakan:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya:

“Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Ali Imran [3]: 26).³³

Adapun Ibn Taimiyah menganggap bahwa mendirikan suatu negara untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara. Alasan lain adalah Allah

³²Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Surabaya: Syirkah Bngil Indah, t.th., hlm. 29

³³Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 79.

memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintahan pada masa Nabi dinamakan *khilafah* dan sesudahnya disebut dengan istilah kerajaan. Meskipun demikian, Ibn Taimiyah tetap membolehkan kerajaan dengan istilah *khilafah (jawaz tasmiyyah al-muluk khulafa)*. Dengan kata lain, raja-raja yang berkuasa boleh menggunakan istilah atau gelar khalifah. Hal ini karena menurut Ibn Taimiyah yang penting ada seorang pemimpin negara ketimbang tidak ada, meskipun bentuknya kerajaan asalkan para pemimpinnya menjaga agama dan keadilan.³⁴

Jika ulama klasik dan pertengahan lebih banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada usaha perbaikan dan saran-saran terhadap pemerintahan yang sudah ada, menjelang akhir abad XIX atau yang dikenal masa kontemporer pemikiran politik Islam mulai mengalami pergeseran yang signifikan dan berkembanglah pluralitas pemikiran tentang sistem *khilafah*.

Munculnya pemikiran politik Islam kontemporer, banyak dilatarbelakangi oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan faktor-faktor internal, dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam. *Kedua*, karena hegemoni Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berujung dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, hingga runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. *Ketiga*, karena keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, organisasi dan politik.

³⁴ Munawir Sjadzali, *op.cit.*, 82

Tiga hal di atas sangat mewarnai orientasi para pemikir politik Islam kontemporer. Umumnya orientasi pemikirannya pada wilayah pembaharuan dan pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya. Namun demikian dalam gagasan pemerintahan terdapat visi yang beragam.

Misalnya Jamaluddin al-Afghani yang menyerukan bahwa dalam usaha pemurnian akidah dan ajaran Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, perlu dibentuk suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam (*Jami'ah Islamiyah*) atau *Pan-Islamisme*. Jami'ah tersebut dibangun atas solidaritas akidah Islam, dengan tujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam untuk menentang sistem pemerintahan (di negeri sendiri) yang despotik dan mengantinya dengan sistem pemerintahan yang diajarkan Islam, juga menentang kolonialisme dan dominasi Barat, termasuk juga menentang sistem pemerintahan Utsmaniah yang absolut. Namun sayang, Afghani tidak menawarkan konsepsi tentang sistem pemerintahan Islam yang ideal, melainkan hanya konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap kezaliman penguasa, lebih-lebih terhadap imperilisme Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya Afghani lebih merupakan aktivis dan agitator politik dari pada pemikir politik.³⁵

Demikian juga dengan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Tetapi ada yang menarik dari gagasan Abduh terhadap sistem pemerintahan Islam. Tidak ada salahnya umat Islam berkiblat kepada Barat dalam pola pemerintahan, jika

³⁵*Ibid.*, hlm. 125.

pola tersebut tidak secara jelas dilarang oleh al-Qur'an maupun sunnah.³⁶ Artinya, pemerintahan Islam tidak harus berbentuk *khilafah*, tapi boleh republik jika dipandang lebih baik.

Gagasan yang hampir sejalan adalah Husain Haikal. Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur'an dan sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan kekhalifahan. Kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru mulai pada waktu Nabi berhijrah dan menetap di Madinah. Nabi mulai meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Ayat-ayat yang diwahyukan dalam periode Makkah terbatas pada ajakan untuk menegaskan Tuhan dan keimanan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Bahkan ketentuan-ketentuan dasar tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi dan budi pekerti tersebut belum menyentuh secara rinci dasar-dasar bagi kehidupan bernegara, apalagi langsung menyinggung sistem pemerintahan.³⁷

Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama. Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok untuk menindak orang lain atas nama agama. Islam juga tidak membenarkan campur tangan penguasa dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain dan tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Salah satu prinsip dari ajaran Islam adalah mengikis habis kekuasaan

³⁶*Ibid.*, hlm. 130.

³⁷Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hlm. 23-24.

keagamaan, sehingga setelah Allah dan Rasul-Nya tidak ada seorangpun yang mempunyai kekuasaan atas akidah dan iman orang lain.³⁸

Pandangan Abduh ini kiranya yang mendorong sahabat dan muridnya cenderung ke arah paham nasionalisme dan sekularisme seperti Lutfi Sayyid, Thaha Husaen dan Ali Abd al-Raziq. Bahkan Abdul Raziq mempertanyakan dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola *khilafah* merupakan keharusan agama. Apabila ditinjau dari segi agama maupun rasio, pola pemerintahan *khilafah* itu tidak relevan. Raziq membedakan antara misi kenabian dengan pemerintahan. Misi kenabian bukanlah pemerintahan dan agama itu bukan negara dan harus dibedakan mana yang Islam dan mana yang Arab, mana yang agama dan mana yang politik. Raziq tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan *khilafah* merupakan suatu kewajiban, dan tidak ada satupun dasar yang mewajibkan itu, baik al-Qur'an, hadis maupun ijma'. Memang, ijma' merupakan sumber ketiga hukum Islam setelah al-Qur'an dan sunnah. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sampai sekarang tidak pernah dilakukan dengan ijma'. Bahkan hampir semua khalifah dari zaman ke zaman dinobatkan dan dipertahankan dengan kekuatan fisik dan ketajaman senjata.³⁹

Selanjutnya Raziq berpendapat bahwa dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau mereka yang tidak beragama sekalipun. Penguasa itulah

³⁸Munawir Sjadzali, *op.cit.*, hlm. 131.

³⁹Ali Abdul Raziq, *op.cit.*, hlm. 34.

pemerintah. Namun pemerintah itu tidak harus berbentuk khalifah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, apakah republik atau diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi baik bentuk maupun sifatnya tidak harus satu, khalifah, dan boleh beragam.⁴⁰

Sementara pemikir politik Islam lain seperti Maududi berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang paripurna, yang mengatur segala aspek kehidupan, dan mendirikan *khilafah* Islam merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Demikian juga pendapat Rasyid Ridha, Hasan al-Bana maupun Sayyid Qutb.⁴¹ Secara umum, teori-teori pemerintahan yang mereka ajukan terdapat kesamaan, misalnya bahwa pola pemerintahan Islam adalah universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa maupun kebangsaan.

Maududi kemudian mengajukan gagasan-gagasan politiknya secara lebih rinci, seperti teori kedaulatan. Menurut Maududi, dalam sistem *khilafah* kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, bukan pada rakyat atau yang lazim disebut demokrasi, tetapi lebih tepat disebut teokrasi meskipun tidak sama dengan teokrasi di Eropa. Manusia hanyalah pelaksana kedaulatan tersebut, dengan membentuk badan-badan pemerintah. Pemerintahan hendaknya dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu: badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴² Jabatan kepala negara, menurut Maududi idealnya diduduki oleh orang yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti: beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴¹ Munawir Sjadzali *op.cit.*, hlm. 151.

⁴² Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan ...*, *op.cit.*, hlm. 73-93.

dan mental, warga negara yang terbaik, shaleh, dan kuat komitmennya kepada Islam.⁴³

Hampir sejalan dengan al-Maududi adalah Taqiyuddin al-Nabhani yang memandang bahwa untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu bahkan tidak boleh meniru pola lain, dan supaya kembali pelaksanaan yang murni dari ajaran Islam, yaitu kembali kepada pola zaman *Al-Khulafa' al-Rasyidun*. Taqiyuddin menganggap bahwa implementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat yang niscaya untuk mencapai tujuan ini. Bentuk negaranya adalah *khilafah*. Sesuai karakteristik Islam yang universal itu, maka sistem *khilafah* harus supra nasional, dan tidak mengakui pengkotak-kotakan yang berdasarkan faktor geografis, suku, etnik dan kebangsaan. Taqiyuddin menyuguhkan sistem politik Islam yang mandiri dan lengkap yang sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam dengan merujuk pola politik semasa generasi pertama Islam. Taqiyuddin sangat menjunjung tinggi model kekhalifahan klasik sebagai satu-satunya bentuk autentik pemerintahan Islam, yang diupayakannya bersama Hizb al-Tahrir untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga tradisional yang menyertainya. Untuk mencapai tujuan ini, al-Nabhani bersama Hizb al-Tahrir menyusun konstitusi yang merinci sistem politik, ekonomi, dan sosial negara yang dimaksud.⁴⁴

⁴³Abu A'la al-Maududi, "Teori Politik Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Penyunting), *Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. V, 1995, hlm. 775.

⁴⁴Taqiyuddin al-Nabhani, *loc.cit.*

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui munculnya polemik tentang sistem *khilafah* terjadi di kalangan ulama kontemporer, terutama sejak runtuhnya *Khilafah* Utsmani di Turki. Kalangan ulama klasik dan pertengahan umumnya menepakati keabsahan sistem *khilafah*, karena secara faktual berada di zaman pemerintahan dengan pemimpin yang bergelar khalifah, meskipun bentuknya kerajaan. Mereka hanya berupa memberikan saran-saran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

PERSEPSI ULAMA NU KOTA SEMARANG TENTANG SISTEM *KHILAFAH ISLAMIYAH*

A. Profil NU Kota Semarang

Memahami sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah*) secara tepat, belumlah cukup hanya dengan melihat dari sudut formal sejak didirikan, tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Sebab, jauh sebelum NU lahir dalam bentuk organisasi (*jam'iyah*), terlebih dahulu terikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri (*jama'ah*).

Lahirnya *jam'iyah* NU tidak ada ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. Wujudnya NU sebagai organisasi keagamaan hanyalah sekadar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham yang berpegang teguh pada mazhab fiqh yang sudah ada jauh sebelum NU lahir sebagai organisasi.¹

Sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*), NU secara resmi berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H., bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M., di Surabaya.² Lahirnya NU sendiri tidak lepas dari dua faktor penting; realitas keindonesiaan dan realitas keislaman. Kedua realitas ini sama-sama mempunyai

¹Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surakarta: TP, 1985, hlm. 1.

²Bahrul Ulum, *Bodohnya NU, Apa NU Dibodohi*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002, hlm. 55.

kaitan erat dengan dunia global; kolonialisme, dan ketegangan peradaban Barat dengan Timur di satu sisi, Barat dengan Islam di sisi yang lain.³

Sebelum terbentuk dengan nama NU, pada mulanya juga merupakan sekumpulan ulama yang tergabung dalam Komite Hijaz, sebuah komite yang dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi ulama yang harus segera diajukan kepada Raja Sa'ud di Hijaz.⁴ Aspirasi para ulama itu ingin menghidupkan dan melestarikan ajaran Islam ahlussunnah waljamaah di tanah Hijaz. Sebab, di Negeri Hijaz saat itu masyarakat dan pemerintahannya dikuasai oleh penganut paham Wahabi yang sangat ekstrem dengan menutup tempat-tempat bersejarah seperti makam para sahabat, keluarga Nabi dan para wali, melarang praktek ziarah kubur, dan tahlil. Tidak hanya itu, pemerintah Hijaz juga menutup ruang gerak golongan Sunni dan Syi'ah yang dianggap tidak sejalan dengan Wahabi.⁵ Selanjutnya untuk memudahkan tugas ini para ulama secepat memutuskan untuk membentuk suatu organisasi dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili Islam tradisional.⁶

Faktor lain yang mendorong berdirinya NU adalah situasi abad XX yang ditandai gerakan Islam pembaharuan dari Timur Tengah mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Gerakan pembaharuan (modernis) merupakan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis yang di antaranya berpandangan bahwa dalam menggapai segala sesuatu harus langsung digali dari al-Qur'an dan Hadis,

³Effendi Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002, hlm. 47.

⁴Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama*, Edisi II, Semarang: LP. Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002, hlm. 24.

⁵Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, Terj. Lesmana, Yogyakarta: LKIS, 1999, hlm. 11.

⁶LP Maarif NU, *op.cit.*, hlm. 3.

bukan dari kitab-kitab karya ulama mazhab klasik. Ziarah kubur, tahlil dan talqin mayit dipandang bid'ah yang harus diberantas. Akhirnya menimbulkan dua gerakan Islam yang tidak dapat dipertemukan, yakni kelompok "modernis" dan "tradisional".⁷ Puncak perdebatan ini pada 1921 yang ditandai dengan sikap Mas Mansur yang menyatakan berpisah dari KH. Wahab Hasbullah dan pindah ke Muhammadiyah.⁸

Berdirinya NU tidak bisa lepas dari sosok dua tokoh besar yaitu KH. Hasyim Asy'ari, ulama Jawa Timur yang sangat disegani saat itu, dan KH. Abdul Wahab Hasbullah, seorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah dan telah aktif di Sarekat Islam (SI) di Makkah, dan mendirikan Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) setelah pulang ke Indonesia.⁹ Tokoh-tokoh lain pada awal perintisan di antaranya; KH. Bisri Syamsuri (Jombang), KH. Abdul Hakim Leuwi Munding (Cirebon), KH. Mas Alwi Abdul Aziz dan KH. Ridwan Abdullah (Surabaya), KH. Maksum dan KH. Kholil (Rembang), Abdullah Ubaid (Kawatan Surabaya), Thahir Bakri, Abdul Halim, Hasan, dan Nawawi (Surabaya).¹⁰

Sebagai *jam'iyah*, NU bergerak dalam bidang sosial keagamaan terutama penyiaran agama Islam menurut faham ahlusunnah waljama'ah. Dengan usaha itu, NU banyak memiliki pondok pesantren serta madrasah dan memiliki

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.*

pengikut yang sangat fanatik, terutama di pedesaan. Sebab, umumnya masyarakat pedesaan memiliki tradisi keagamaan sangat kuat.¹¹

Setelah NU dibentuk, spontanitas para ulama di daerah pun membentuk cabang-cabang NU di daerahnya masing-masing, tanpa menunggu instruksi dan petunjuk dari pengurus pusat. Spontanitas merupakan salah satu ciri khas masyarakat NU, meskipun terkadang juga bersikap telalu berhati-hati menerima sesuatu yang dipandang baru.¹²

Pada awal berdirinya, NU bersama-sama dengan organisasi lain yang telah berdiri, ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Sebagai salah tokoh anutan umat, apalagi setelah memiliki wadah NU, KH. Hasyim Asy'ari semakin merasa terpanggil untuk menggerakkan masyarakat untuk mengakhiri penjajahan oleh Belanda.¹³

Sejak awal berdirinya, NU memilih ulama sebagai panutan dan sebagai kekuatan inti. Ulama dipandang sebagai penerus tugas Nabi Muhammad S.a.w., dalam membimbing dan mengayomi umat baik dengan ilmu, akhlak, dan keteladanannya. Ulama merupakan panutan masyarakat. Jika NU berhasil membangkitkan ulama, maka akan bangkitlah umat dan masyarakat pengikutnya. Tanpa ulama, NU akan kehilangan arah dan tanpa ulama, NU akan kehilangan dukungan.¹⁴

¹¹Mustafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2000, hlm. 58.

¹²A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994, hlm. 67-70.

¹³Syaifullah Ma'sum, *Menapak Jejak Mengenal Watak Biografi 126 Tokoh NU*, Jakarta: Yayasan Sarifuddin Zuhri, 1994, hlm. 107.

¹⁴Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung, Semarang: Lajnah Ta'lif Wanasir, t.th., hlm. 242.

Demikian profil NU secara makro (nasional). Seperti dikemukakan di atas, bahwa setelah didirikan NU sebagai wadah bagi kaum tradisional, spontanitas ulama-ulama daerah yang sepaham juga mendirikan cabang-cabang seperti di Kota Semarang dengan kedudukan sebagai Cabang. Fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan NU dalam lingkup daerah di bawah PWNU (Kepengurusan Tingkat Propinsi).

Sebagai organisasi struktural di bawah PBNU dan PWNU, PCNU Kota Semarang bertugas melaksanakan program-program yang datang dari atas untuk dilaksanakan di tingkat cabang (kota/kabupaten). Misalnya menindaklanjuti himbauan serta seruan menyangkut masalah umat secara nasional maupun regional, di samping juga menjalankan program-program yang bersifat lokal.

PC NU Kota Semarang masa khidmat 2006-2011 telah merumuskan program kerja berdasarkan hasil evaluasi periode sebelumnya. Ada tujuh program kerja yang dikerjakan selama perjalanan hidmatnya 5 tahun. Ketujuh program kerja tersebut adalah:

1. Perbaikan kinerja
2. Konsolidasi organisasi
3. Pendidikan dan pengkaderan
4. Sosialisasi aswaja
5. Penggalan dana
6. Pemberdayaan ekonomi umat
7. Pengembangan sarana dan prasarana dakwah.

Ketujuh program kerja tersebut dirumuskan berdasarkan penelitian empiris kebutuhan organisasi dan masyarakat. Pelaksanaan program kerja tersebut menggunakan pendekatan empat (4) prinsip, yakni; kebersamaan, tanggung jawab (akuntabilitas), demokratis, dan keterbukaan (transparan).

Program kerja tersebut diurai dalam bentuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga tidak harus runut dan setertib acuan rancangan program dimaksud, namun lebih menitikberatkan pada kebutuhan dan kemampuan.¹⁵

Adapun struktur PCNU Kota Semarang untuk masa jabatan 2006-2011 adalah sebagai berikut:

¹⁵Ringkasan Eksekutif Rencana Program Kerja PCNU Kota Semarang Masa Khidmat 2006-2011, hlm. 2-4.

MUSTASYAR

KH. Siroj Khudlori
 Drs. KH. Mustaghfiri Asror
 KH. Habib Umar Muthahar, SH
 KH. Syaihun
 KH. Mahfud Utsman
 KH. Yusuf Masykuri, Lc.

SYURIYAH

Rais
 Wakil Rais
 Wakil Rais
 Wakil Rais
 Wakil Rais
Katib
 Wakil Katib
 Wakil Katib
 Wakil Katib

Drs. KH. A. Hadlor Ihsan
 Drs. HM. Hamdani Yusuf
 Drs. Moh. Bisri
 Drs. KH. Mahsuni
 Habib Jafar Al Musawa
 KH. A. Rohibin Hamdan
 K. Rohani Amin Hidayat
 Drs. H. Sholihul Huda, MM.
 KH. Fathullah Ahmadi, BA.

A'wan

KH. Saliyun Muh. Amir
 Drs. KH. Baidwowi Shomad
 KH. Mahrus Abdullatif
 KH. Muhaimin Mansur
 Drs. KH. Ahmad Syamhudi, S.Pd.

Drs. Makruf
 K. Kamijan DP
 Drs. H. Muhtarom
 KH. Subhi Abadi

TANFIDZIYAH

Ketua
 Wakil Ketua
 Wakil Ketua
 Wakil Ketua
 Wakil Ketua

H.M. Kabul Supriyadi, SH, M.Hum
 Drs. H. Anasom, M.Hum
 Ir. H. Khammad Maksom Al Hafidz
 Drs. H. Syafi'i
 Ahmad Abdul Rosyid, SH

Sekretaris

Wakil Sekretaris
 Wakil Sekretaris
 Wakil Sekretaris
 Wakil Sekretaris

Drs. Abdoel Khaliq, M.Pd.
 Drs. H. Fathurrohman
 Drs. Subchan, M.Pd.
 Budi Ahmad Suhadi, S.Pd.I
 Ahmad Junaidi, S.Kom.

Bendahara

Wakil Bendahara
 Wakil Bendahara

Mulyo Putro, SH, MA.
 H. Suparjo
 Drs. H. Farhani, SH, MA.¹⁶

¹⁶Lampiran SK PBNU Nomor 176/A.II.04.d/12/2006 tentang Susunan PCNU Kota Semarang Masa Jabatan 2006-2011.

B. Corak Fahaman Keagamaan NU

Disebutkan dalam buku pegangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) keputusan Mukhtamar ke-27 di Situbondo, bahwa dasar-dasar fahaman keagamaan NU adalah sebagai berikut:

1. NU mendasarkan fahaman keagamaannya kepada empat sumber ajaran Islam; al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
2. Dalam memahami, menafsirkan Islam dan sumber-sumbernya tersebut, NU mengikuti fahaman ahlusunah waljamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab:
 - a. Bidang akidah, NU sesuai dengan pendekatan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.
 - b. Bidang fiqh dengan pendekatan salah satu empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali).
 - c. Bidang tasawuf sesuai dengan ajaran Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.¹⁷

Sejak berdirinya, NU telah menjadikan fahaman ahlusunah waljamaah sebagai dasar teologi (akidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sebagai pegangan dalam fiqh, meskipun kenyataan kesehariannya para ulama NU hanya menggunakan fiqh yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Namun dalam kondisi tertentu, untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional, terkadang berpaling ke mazhab lain.¹⁸

¹⁷PBNU, *Hasil Mukhtamar NU ke-27 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, 1986, hlm. 154.

¹⁸M.A. Sahal Mahfudh, "Kata Pengantar", dalam M. Imaduddin Rahmat, (Ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002, hlm. x-xi.

Dengan demikian dalam mengkaji dan menetapkan jawaban permasalahan yang dihadapi, NU membahasnya dengan cara-cara yang dipegang oleh mazhab, yakni dengan menelusuri dahulu penjelasan-penjelasan ulama dalam kitab-kitab mazhab yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tentunya dengan tetap memegang pada sumber-sumber hukum Islam *ahlusunnah waljamaah*; al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Inilah yang dilakukan NU dalam proses *istinbath hukum* dalam forum yang disebut *bahtsul masa'il*.

Bahtsul masa'il dalam NU merupakan forum pembahasan terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan persoalan agama, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.¹⁹ Sebagai forum pembahasan hukum tentang berbagai masalah keagamaan dan sosial-kemasyarakatan, termasuk masalah-masalah aktual, bertujuan menggali hukum Islam untuk memberikan berbagai jawab terhadap masalah yang sedang berkembang, atau yang sedang dihadapi tersebut dari kacamata agama.²⁰

Tentang proses *bahtsul masa'il* ini dapat dijelaskan bahwa materi yang dibahas biasanya datang berbagai pengajuan masyarakat, perseorangan maupun organisasi yang ada di lingkungan NU yang disampaikan kepada pengurus Syuriah NU. Setelah itu pengurus menginventarisir masalah-masalah tersebut, kemudian diadakan seleksi berdasarkan skala prioritas, pembahasannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak pada waktu itu. Setelah pengurus Syuriah menentukan topik masalahnya, kemudian masalah itu dibahas dan dicarikan dasar masalahnya oleh berbagai anggota *bahtsul masail (musyawirin)*

¹⁹Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, *op.cit.*, hlm. 54.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

yang biasanya terdiri atas kyai pesantren. Apabila pembahasannya mengalami kemacetan (*mauquf*), maka pembahasannya akan diulangi lagi di tingkat organisasi yang lebih atas. Contohnya apabila *mauquf* di tingkat ranting, maka dilanjutkan ke cabang, kemudian ke wilayah, selanjutnya ke pengurus besar, lalu ke munas, dan yang tertinggi ke muktamar.²¹

Suatu hal yang bersifat prinsip dalam bahtsul masail adalah istinbath hukum. Secara bahasa *istinbath* berasal dari kata '*istinbatha*' artinya menemukan dan mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur'an dan hadis melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan ijtihad.²²

Istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan sunnah, tetapi dilakukan dengan mentatbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya. Istinbath hukum secara langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas mazhab di samping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah

²¹ *Ibid.*

²² Ali Hasbalah, *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, Mesir: Daar al-Ma'arif, t.th., hlm. 79.

memahami ibarat-ibarat kitab fiqh yang sesuai dengan terminologinya yang baku.²³

Terkait dengan produk hukum yang dihasilkan oleh PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.²⁴ Sebab secara definisi, NU memberikan definisi istinbath hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan syara' dengan kaidah fiqh (*al-qawa'il al-fiqhiyah*).²⁵

Sejak Munas Alim Ulama NU di Lampung pada 1992, NU sedang berusaha merumuskan istinbath hukum baru yang semula *qauly* (produk) ke *manhajy* (metodologi) dan merekomendasikan para ulama yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar (al-Qur'an dan sunnah). Jika tidak mampu maka dilakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa *istinbath* (menggali dari teks asal/dasar) maupun *ilhaq* (*qiyas*).

C. Visi Kebangsaan NU

1. NU dan Politik

Perjalanan NU sejak dilahirkan sampai sekarang tidak pernah lepas terlibat dari persoalan kebangsaan. Pada awalnya NU berdiri sebagai jangkar bagi hidupnya tradisi sosial keagamaan yang berdasar pada tradisi dan budaya lokal masyarakat setempat. Mulanya sebagai bentuk perimbangan

²³M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 27.

²⁴*Ibid.*, hlm. 15.

²⁵ PBNU, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, Jakarta: Lajnah Ta'lif Wannashr, 1998, hlm. 6.

kondisi sosial politik lokal dan internasional saat itu yang menginginkan pemurnian tauhid Islam dari pencampurannya dengan tradisi dan budaya yang boleh dikatakan datang di luar tradisi Islam.

NU justru terlibat lebih banyak dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Finalisasi kerangka negara pun NU ikut berperan dengan menyetujui bentuk negara NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya, bukan Islam.²⁶

Saat Orde Baru berkuasa, NU kemudian menggerakkan semangat berdemokrasi sambil pelan-pelan menumbuhkan terwujudnya *civil society*. Pemerintahan Orde Baru yang cenderung tiranik disikapi NU dengan pengambilan jarak yang sama (*equal distance*) dengan organisasi partai politik maupun organisasi yang senada dengan Orba. Pasca Orde Baru tumbang, dengan semangat *Khitah 26* yang dipertegas dalam Muktamar 1984 di Situbondo, NU juga ikut ikut mengantarkan perubahan sejarah bangsa menuju transformasi ke zaman reformasi.²⁷

Reformasi membawa kecenderungan banyak organisasi untuk meluaskan jangkauan keterlibatan ke ranah publik utamanya dunia politik. Kuran kebebasan yang terbuka lebar juga menarik NU untuk terlibat ke wilayah yang selama ini dianggap “haram” atau wilayah abu-abu itu (*grey*

²⁶Ridho Imawan Hanafi, “NU dan Penghidmatan Kebangsaan”, dalam *Media Indonesia*, Edisi, Jumat, 1 Februari 2008, hlm. 4.

²⁷Nurani Soyomukti, “NU dan Visi Kebangsaan di Era Neoliberal”, dalam *Majalah Perspektif*, Edisi 142, Desember 2007, hlm. 12.

area), yaitu politik. Hadirlah banyak partai yang mengatasnamakan partainya wong NU.²⁸

Secara potensi dilihat dari sumber daya dan modal melalui warganya NU memang besar. Tetapi berkat ketegasan yang dikukuhkan melalui kiai dan ulama yang memayungi, NU secara struktural organisatoris tetap berdiri kokoh sebagai organisasi sosial keagamaan (*jamiyah diniyah*). Namun demikian, secara personal harus diakui secara jujur bahwa kaum *nahdhiyin* mempunyai naluri yang cukup besar untuk terjun dalam berpolitik. Sehingga NU memberikan kebebasan yang besar bagi jamaahnya untuk menentukan pilihan tanpa harus melibatkan NU sebagai organisasi.²⁹

Visi kebangsaan NU dengan menganggap final NKRI sebagai bentuk kedaulatan negara serta Pancasila sebagai dasar, terus dipertahankan, bahkan semakin dikokohkan. Oleh karena itu, berbagai wacana yang diproduksi berbagai kalangan beberapa diantaranya mencoba untuk mencari alternatif lain seperti perlunya Islam sebagai dasar hukum atau penegakan syariat, hingga pendirian *Khilafah Islamiyah* ditolak oleh NU. Hal inilah yang membuat NU dikenal sebagai organisasi Islam yang moderat dan menghargai pluralitas. Kebangsaan bagi NU adalah bagian terpenting dari iman. Terbukti NU masih kental dengan nilai-nilai mulia seperti perlunya pelestarian semangat ikatan kebangsaan (*al-ukhuwah al-wathaniyah*), ikatan kemanusiaan (*al-ukhuwah al-basyariyah*), dan ikatan keislaman (*al-ukhuwah al-islamiyah*). Islam kebangsaan lebih bernilai daripada harus memaksakan

²⁸ Ridho Imawan Hanafi, *loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*

perlunya Islam doktrinal dengan bumbu penegakan secara formal syariat. Dari pengimanan akan nilai-nilai kebangsaan inilah NU terus-menerus mengingatkan akan keutuhan bangsa.³⁰

Seperti dikemukakan KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), NU memiliki dua visi politik, yakni politik yang bersifat substansial dan politik praktis. Visi yang pertama, katanya, NU memperjuangkan politik kebangsaan yang berdasarkan pada nilai-nilai ke-Islam-an, terutama nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Hal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kekuasaan. Di sisi lain NU juga berkepentingan dalam politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan. Tujuannya melakukan penataan pada sistem pemerintahan dan kenegaraan yang menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat. Namun, hal itu tak mungkin dijalankan langsung oleh NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam. Kalau NU menjadi parpol, maka akan bersaing di kekuasaan. Hal itu akan mengganggu nilai-nilai luhur Islam yang dibawa para ulama.³¹

Kiprah NU dalam politik praktis saat menjadi partai politik pada 1950-an dan 1970-an. Sejarah mencatat, kiprah Nahdlatul Ulama (NU) dalam perpolitikan bangsa cukup diperhitungkan dan disegani karena kekuatannya yang cukup besar, terlebih ketika NU tampil sebagai partai politik yang berdiri sendiri pada tahun 1952-1973. Persoalan muncul ketika Pemilu 1971. Golkar menang mutlak dengan perolehan suara 62,80% atau 236 kursi DPR

³⁰ *Ibid.*

³¹NU Online, "Hasyim Ingatkan PKB Agar Tak Lupakan Visi Perjuangan NU", dalam *Warta*, <http://www.nu.or.id>. Diakses tanggal 27 Juni 2008, Jam 08.00. WIB

ditambah kursi Karya ABRI dan non-ABRI yang diangkat. Dengan mengantongi 336 kursi dari keseluruhan kursi yang berjumlah 460 di DPR, maka Golkar memiliki suara mayoritas mutlak. Sedangkan suara partai-partai Islam (kalaupun digabung) hanya mencapai 20,3% atau 94 kursi. Dari 94 kursi tersebut, 58 kursi (61,7%) adalah milik NU.³²

Kondisi ini mengakibatkan posisi tawar kelompok Islam dalam DPR sangat lemah. Sampai akhirnya, pada 5 Januari 1973 keempat partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) sepakat melakukan fusi. Maka lahirlah partai politik baru yang menyatukan keempat partai Islam tersebut, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keterlibatan NU dalam kancah politik yang dirasa sudah terlalu jauh, ditambah lagi munculnya konfrontasi antara NU dengan kelompok lain di PPP, membuat NU harus introspeksi diri. Puncaknya, pada Mukhtamar XXVII tahun 1984 di Situbondo NU memutuskan kembali ke Khittah 1926, sebagai organisasi sosial keagamaan. Setelah itu, NU menarik diri sepenuhnya dari wilayah politik praktis.³³

Kembali ke khittah 26, bukan berarti NU meninggalkan dunia politik sepenuhnya. Yang ditinggalkan hanya dalam wilayah politik praktis, yaitu NU ikut pemilu. Politik kebangsaan NU tetap dijalankan sebagai organisasi kemasyarakatan. Sehingga setelah bergulirnya reformasi tahun 1998, naluri tokoh-tokoh NU untuk berpolitik praktis kembali bangkit dengan mendirikan

³²M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-37.

³³Abdul Syakur, "Meneguhkan Sikap Politik NU", dalam *Majalah Arwaniyah*, Edisi VI, Juni 2008, hlm. 3.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh KH. Abdurrahman Wahid (manta Ketua Umum PBNU).

2. NU dan Sistem *Khilafah Islamiyah*

Sejak era reformasi, sumbatan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat dibuka. Partai politik (parpol) baru bermunculkan dengan berbagai latar belakang paham, kecuali yang berpaham komunis. Partai Islam merupakan partai yang paling banyak muncul, namun jumlahnya tidak besar. Hingga kini, hanya dua partai Islam saja memperoleh suara cukup besar; PPP dan PKS. Itupun masih jauh di bawah partai nasionalis seperti Golkar dan PDI-P.

Selain partai politik, muncul pula ormas yang memperjuangkan gagasan politik Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Bahkan Agustus 2007, HTI berhasil menyelenggarakan Konferensi *Khilafah* Internasional (KKI) yang dihadiri satu juta masa HTI. Keberhasilan ini memompa semangat anggota HTI di sejumlah tempat sehingga menimbulkan gesekan dengan aktivis NU.³⁴

Bagi NU sendiri, pandangannya terhadap sistem *khilafah* atau sekadar negara Islam sudah jelas, menolak. Pada Muktamar NU tahun 1930 di Banjarmasin, NUT tidak memperyasaratkan negara Islam. Negara Hindia Belanda dipandang oleh NU sebagai negara yang dapat memberi kesempatan warga NU menjalankan ketentuan syari'at Islam sehingga tidak

³⁴Shalahuddin Wahid, "NU dan *Khilafah Islamiyah*", dalam *Harian Republika*, 3 September, 2007, hlm. 4.

dipermasalahan. Fakta historis inilah yang sering dikemukakan sebagai argumen bahwa NU tidak menghendaki negara Islam.³⁵

Pada awal kemerdekaan, semua Ormas Islam bergabung dengan Partai Masyumi. Mereka memperjuangkan negara berdasar Islam. Tidak satu pun tokoh pergerakan memperjuangkan *Khilafah Islamiyah* atau negara Indonesia yang menjadi bagian dari suatu organisasi negara internasional. Didirikannya Nahdlatul Wathan yang dipelopori oleh Wahab Hasbullah dan Mas Mansyur, dengan visi membangun nasionalisme melalui pendidikan dengan dukungan HOS Cokroaminoto, Raden Panji Suroso, dan Sunjoto, menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan sejumlah tokoh ormas Islam ketika itu. Sikap kebangsaan itu sebagai akibat dari pengaruh Syaikh Zaeni Dahlan, ulama terkenal Makkah, terhadap para muridnya antara lain KH. Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU lainnya.³⁶

Ketika itu wajar kalau NU dan ormas Islam lain di dalam Masyumi memperjuangkan negara Islam pada awal kemerdekaan RI. Jika tidak malah tidak wajar, sebab Indonesia baru memperoleh kemerdekaan dan mendapat kesempatan membahas negara semacam apa yang akan didirikan. Mestinya tokoh NU saat itu banyak bergelut melalui pemikiran dengan kitab-kitab yang membawa para tokoh itu menuju cita-cita negara Islam. Pada saat itu negara Islam berkonotasi positif. Pada tahun 1945 NU yang bergabung dalam Partai Masyumi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi gagal.

³⁵ Said Agil Siradj, "NU, Aswaja, dan Visi Kebangsaan", dalam Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 2007, hlm. 2.

³⁶ Shalahuddin Wahid, *loc.cit.*

Piagam Jakarta yang merupakan kompromi (22 Juni 1945) akhirnya juga dibatalkan (18 Agustus 1945). KH. A. Wahid Hasyim sebagai wakil NU di dalam BPUPKI berandil menyetujui Pancasila sebagai dasar negara.

Partai NU bersama partai Islam lainnya memperjuangkan lagi dasar negara Islam dalam konstituante yang juga gagal. NU memperjuangkan posisi Piagam Jakarta saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Piagam Jakarta dijadikan pertimbangan oleh BK bagi berlakunya kembali UUD 1945, namun lagi-lagi gagal.³⁷

Pada era Orde Baru, setelah Munas Alim Ulama NU pada 1983 menyetujui Dokumen Hubungan Islam dan Pancasila, NU menyatakan NKRI berdasar Pancasila bentuk final,³⁸ sama dengan TNI, Golkar dan PDI. Tidak hanya itu, NU juga menyetujui Pancasila sebagai asas tunggal yang dipaksakan oleh Orde Baru.

Keputusan ini dipertegas lagi dan diperkuat dalam Keputusan Mukhtar NU ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004 bahwa NU telah menegaskan NKRI dengan dasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan NU.³⁹

Namun sebagian warga NU yang bergabung dengan PPP sampai tahun 2001 masih memperjuangkan negara bernuansa Piagam Jakarta. Tapi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Bahrul Ulum, *loc.cit.*

³⁹ Lajnah Bahtsul Masa'il PBNU, *Hasil-hasil Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2004, hlm. 62-63.

sebagian besar yang di PKB dan Partai Golkar, mempertahankan Pancasila sebagaimana adanya.

Dengan demikian, NU merlukan waktu lama untuk menyadari bahwa Pancasila dan Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi berkesesuaian. Tegasnya, sejak dulu hingga sekarang, NU tidak pernah menyetujui pendirian *Khilafah* Islamiyah di Indonesia.

D. Persepsi Ulama NU Kota Semarang tentang Sistem *Khilafah Islamiyah*

Khilafah merupakan bentuk negara/pemerintah universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama (*al-din wa al-daulah*). *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. *Khilafah* juga berfungsi mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Artinya, *khilafah* merupakan sistem sebagai pengemban dakwah pengganti Rasulullah S.a.w.⁴⁰

Ketika Nabi Muhammad S.a.w. wafat, para sahabat menyadari bahwa untuk peran sebagai pemimpin umat yang bertugas menjaga pelaksanaan ajaran agama dan mengurus persoalan politik, posisi Nabi wajib dilanjutkan. Oleh karena itu, para sahabat bergegas memilih *khalifah*, dan pemilihan itu dilaksanakan sebelum jenazah Nabi dimakamkan. Meskipun para sahabat tahu bahwa jenazah harus segera dimakamkan, namun persoalan kemasyarakatan dirasa lebih mendesak untuk diselesaikan.

⁴⁰Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Umah, 1996, hlm. 18.

Lembaga yang dipimpin oleh khalifah dinamakan *khilafah*. *Khilafah* diawali dengan terpilihnya Abu Bakar al-Shidiq pada tahun 632 M., yang kemudian berturut-turut digantikan oleh Umar bin Khattab (634-644 M.), Utsman bin Affan (644-656 M.) dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M.). Mereka dijuluki *Khulafa' al-Rasyidun*. *Khilafah* kemudian beralih ke tangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dst., hingga *Khilafah* Utsmaniyah (Turki Utsamani). *Khilafah* berakhir setelah dihapuskannya *Khilafah* Utsmaniyah oleh Musthafa Kamal Attaturk, tahun 1924. Meskipun pasca Khalifah Ali bin Abi Thalib, suksesi kepemimpinannya tidak melalui musyawarah lagi seperti pada masa *Khulafa' al-Rasyidun*, namun melalui pengangkatan secara turun-temurun, tetap menggunakan gelar *khilafah*.

Pasca dihapuskannya *Khilafah* Utsmaniyah, maka tidak ada lagi sistem pemerintahan/negara yang menamakan *khilafah*. Mulai saat itu pula, muncul perbedaan pendapat di kalangan umat Islam; apakah perlu atau tidak menegakkan kembali *khilafah Islamiyah*? Belakangan, pro-kontra kembali mengemuka dengan kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari Hizbut Tahrir yang gencar mewacanakan mendirikan kembali sistem *khilafah*.

Puncaknya diadakan acara Konferensi *Khilafah* Internasional (KKI) di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2007 oleh HTI.⁴¹ Gagasan HTI tersebut mendapat penolakan khususnya dari Nadhlatul Ulama secara kelembagaan, maupun oleh ulama-ulama NU secara personal. Meskipun demikian, banyak pula yang memberikan apresiasi terhadap wacana tersebut.

⁴¹[Http:// www.Hizbut-Tahrir.Or.Id.](http://www.Hizbut-Tahrir.Or.Id.), diakses Tanggal 15 Februari 2008, pukul 20.10 WIB

Demikian juga yang dilakukan ulama NU di Kota Semarang, secara kelembagaan menolak gagasan pendirian *khilafah*. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap persepsi ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah*, meskipun secara umum menolak, namun didapati pandangan beragam. Penulis mewawancarai beberapa informan ulama NU Kota Semarang baik dari jalur struktural maupun kultural. Struktural di sini adalah pengurus PCNU yang terdiri atas Mustasyar, Suriyah dan Tanfidziyah. Sedangkan kultural adalah ulama NU secara umum yang tidak masuk struktur kepengurusan NU.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang persepsi ulama NU Kota Semarang tentang sistem *khilafah Islamiyah*, setelah penulis rangkum, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Drs. H. Anasom, M.Hum (Pengurus Tanfidziyah) menyatakan bahwa Nabi Muhammad S.a.w. tidak pernah memberikan contoh model pemerintahan Islam yang baku. Sistem *khilafah* juga tidak dikenalkan oleh Nabi. Ketika memimpin negara Madinah, Nabi menggunakan pola yang saat sekarang diistilahkan dengan demokrasi. Hal ini bisa dilihat bahwa Piagam Madinah dirumuskan bukan hanya aspirasi umat Islam, namun semua komunitas yang ada ketika itu, sehingga dapat mengatur seluruh etnik yang ada.⁴²

Jika yang dimaksud sistem *khilafah* adalah pasca wafatnya Nabi, justru banyak terjadi penyimpangan menurut ajaran Islam sendiri. Ambisi-ambisi duniawi kelihatan dominan, khususnya pada masa Mu'awiyah dan seterusnya. Tentunya tanpa harus menafikan keberhasilan Islam dalam memimpin peradaban

⁴²Wawancara dengan Drs. Anashom, M.Hum, Pengurus Tanfidziyah NU Kota Semarang, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2008, Pukul 8.30-9.30, di Kantor Fakultas Dakwah IAIN Walisongo.

dunia pada masa Harun al-Rasyid. Pasca *Khulafa' al-Rasyidun*, yang diberlakukan adalah sistem monarki hingga Turki Utsmani. Sebenarnya pasca *Khulafa' al-Rasyidun* sudah tidak ada sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* era *khulafa al-rasyidun* juga tidak relevan untuk konteks sekarang. Konteksnya sangat berbeda. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat sempit, hanya Madinah dan sekitarnya. Sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam sudah berbentuk *nation state*, mapan, terikat dengan konstitusi dan semuanya dalam kendali PBB.

Sistem *khilafah Islamiyah* hanya sesuai untuk konteks masa sahabat. Pada masa *Khulafa' al-Rasyidun* juga tidak semuanya ideal. Buktinya para khalifah selain Abu Bakar, meninggal karena dibunuh. Ini menunjukkan adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan.⁴³

Anasom menyatakan; menurut Islam yang penting dalam bernegara adalah dapat menjalankan ajaran Islam secara aman tanpa hambatan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Bentuknya bisa republik seperti Indonesia, kerajaan seperti Malaysia, dan yang lainnya. Intinya tidak ada yang baku model suatu pemerintah, dapat disesuaikan dengan kondisi.⁴⁴

NU sendiri mengambil sikap bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah final. Meskipun NU juga mengakui NKRI belum sepenuhnya ideal, tapi tinggal memperbaiki. Bukankah tidak ada hambatan dalam menjalankan ajaran Islam dalam NKRI. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam. Anasom

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

menambahkan bahwa sistem *khilafah* mungkin saat ini dapat diwujudkan, tapi bentuknya tidak lagi sebagai lembaga politik atau negara.⁴⁵

Pandangan hampir serupa dikemukakan oleh KH. Ahmad Hadlor Ihsan (Ketua Syuriah PCNU). Ia mengemukakan bahwa sistem *khilafah Islamiyah* sebagai pola kepemimpinan tunggal sangat sulit diterapkan untuk kondisi sekarang. Jika sekarang diterapkan kembali akan lebih banyak menimbulkan konflik, banyak madharatnya karena harus merombak semua tatanan bernegara yang sudah berjalan. Apalagi dengan banyaknya mazhab, faham sangat sulit untuk menentukan suatu kesepakatan, misalnya siapa yang berhak menjadi khalifah, di mana pusat kekuasaannya, dan lain-lain. Mungkin yang lebih sesuai untuk kondisi sekarang adalah khalifah dalam pengertian pemimpin *fi al-daulah*, bukan *fi al-umamah* (khalifah/pemimpin negara secara nasional, bukan pemimpin negara secara internasional). Islam sendiri lebih pas dikatakan sebagai *al-din wa al-ummah* (agama dan umat), bukan *al-din wa al-daulah* (agama sekaligus negara).⁴⁶

Menurutnya, tidak ada satu dalilpun baik al-Qur'an, maupun hadis yang mewajibkan menegakkan *khilafah*. Jika ada anggapan dengan dihidupkannya kembali sistem *khilafah* ajaran Islam lebih mudah diterapkan, itu malah menunjukkan sistem *khilafah* hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Jika sebagai sarana, apa saja bisa digunakan. Artinya, negara model apa saja yang di situ umat Islam terjamin bisa menjalankan perintah agama, itu bisa dijadikan sarana. Itulah

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Wawancara dengan KH. Ahmad Hadlor Ihsan, Ketua Syuriah PC NU Kota Semarang, pada hari Jumat, 18 April 2008, Pukul 16-30-17.15 di Kantor PCNU Kota Semarang.

sebabnya NU menyatakan sikap bahwa bentuk NKRI sebagai bentuk final. Tidak ada hambatan bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dalam NKRI. Selain itu, bagi NU, penerapan ajaran Islam di satu negara, tidak harus formal. Yang terpenting adalah nilai-nilainya, itulah yang jadi prioritas.⁴⁷

Bagi NU, negara dalam bentuk apapun yang penting umat Islam dapat menjalankan ajarannya. Itulah sebenarnya sistem politik yang dikehendaki Islam. Sebaliknya, meskipun bentuknya *khilafah*, namun pemerintahnya dhalim, rakyatnya sengsara dan tidak bebas menjalankan ajaran sesuai dengan mazhab yang dianut, justru bertentangan dengan Islam. Ia mengutip pendapat Ibn Taimiyah; *Inallaha yansuru daulatan al-adilatan walau kafiran, wala yansuru al-daulatan muslimatan walakin dhaliman* (Allah akan menolong suatu negara yang diperintah dengan adil, meskipun pemimpinnya kafir. Sebaliknya, Allah tidak akan menolong suatu negara yang diperintah dengan kedhaliman meskipun pemimpinnya muslim). Ia juga mengutip pendapat Jamal al-Bana (adik kandung Hasan al-Bana); bahwa jihad di dunia modern adalah bukan bagaimana agar bisa mati syahid, tetapi bagaimana bisa hidup dengan menegakkan agama Allah.⁴⁸

Demikian juga pandangan yang dikemukakan oleh KH. Siroj Khudlori (Mustasyar PCNU Kota Semarang). Secara kelembagaan NU menolak sistem *Khilafah Islamiyah* kembali diterapkan semata-mata pertimbangan maslahat, dan menghindari madharat yang lebih besar. Bisa dibayangkan, semua tatanan di negara-negara muslim akan dirombak, pasti mereka tidak rela. Apalagi kemerdekaan yang diperoleh negara-negara berpenduduk muslim seperti

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Indonesia memerlukan perjuangan yang sangat berat. Mungkin yang agak pas sistem *khilafah al-daulah* (*khilafah* dalam sebuah negara nasional). Namun itu juga akan menimbulkan masalah besar, nanti satu sama lain saling mengklaim memiliki otoritas keagamaan. Hal ini bisa dilihat dalam sejarah Mu'awiyah dan keturunannya selalu bermusuhan dengan Ali dan keturunannya, hingga terjadi pertumpahan darah. Penyebabnya karena ada dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim memiliki otoritas keagamaan.⁴⁹

Secara personal sebenarnya ia memberikan apresiasi terhadap kelompok yang mewacanakan sistem *khilafah*. Sebab, minimal dapat mengingatkan umat Islam bahwa mereka pernah memiliki sebuah sistem politik dalam sejarah yang bernama *khilafah*. Namun ia juga mengharapkan agar lebih baik bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang sudah terbuka di negara yang bebas menjalankan agama seperti Indonesia, agar lebih maksimal. Ajaran-ajaran Islam dapat diamalkan secara kultural, mulai dari level individu hingga masyarakat. Dari yang ringan-ringan saja, misalnya beribadah secara benar, beramal kebaikan, berdakwah, berinfak, bershadaqah, dan lain-lain.⁵⁰

Sedangkan KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH, (ulama NU kultural) memiliki pandangan bahwa sistem *khilafah Islamiyah* merupakan sistem yang sudah sangat lama, yaitu pada masa *Khulafa' al-Rasyidun*. Masa sesudahnya sistem monarkhi yang diterapkan, meskipun rajanya menggunakan gelar khalifah. Itulah

⁴⁹Wawancara dengan KH. Siroj Khudlari, Mustasyar PCNU Kota Semarang, pada hari Minggu, 20 April, 2008 Pukul 08.15-08.55 di rumahnya.

⁵⁰*Ibid.*

sebabnya dinamakan Dinasti. Namun ketika itu masih ada semangat dan tanggung jawab menyebarkan Islam ke penjuru dunia.⁵¹

Sebagai sistem yang sangat lama, sedang sistem politik itu sangat dinamis, maka akan sulit sekali diterapkan kembali di masa sekarang. Instrumen-instrumen, atau perangkat-perangkat pemerintahan yang ada dan dibutuhkan sekarang ini berbeda dengan masa yang lalu. Tidak mungkin negara-negara yang sudah ada, yang diperjuangkan melalui pengorbanan nyawa, dengan suka rela meleburkan diri ke dalam negara lain. Harus realistis, Indonesia dengan Malaysia saja tidak mau akur, apalagi bergabung.⁵²

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh KH. Haris Shodaqoh (ulama NU kultural). Ia memandang jika sistem *khilafah* diterapkan, alih-alih sebagai amar ma'ruf nahi munkar, tetapi munkarnya akan lebih banyak dari pada ma'rufnya. Artinya, terlalu mahal *cost* atau resiko yang harus ditanggung. Menurut Islam, yang terpenting dalam bernegara bukan pada bentuknya, tetapi bagaimana Islam di situ bisa hidup dan berkembang.⁵³

Kedua ulama NU tersebut menyatakan tidak ada satu ayat al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan untuk membentuk pemerintahan model *khilafah*. Justru ada sebuah hadis yang menyatakan: *antum a'lamu bi umuri duniyakum* (Kamu lebih tahu terhadap urusan dunia kamu). Politik merupakan persoalan keduniaan. Jadi umat Islam diberi otoritas untuk mengaturnya sendiri,

⁵¹Wawancara dengan KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2008, Pukul 13.30-14.15 di rumahnya.

⁵²*Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan KH. Haris Shodaqoh, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2008, Pukul 16.30-15.30 di rumahnya.

termasuk memilih bentuknya yang sesuai. Ajaran agama mungkin akan lebih mudah jika ada negara yang dapat menjaminnya. Namun negara itu tidak harus *khilafah*. Sekali lagi, menurut Islam yang terpenting adalah ajaran Islam dapat diamalkan, di manapun dan kapan pun. Yang diwajibkan oleh Islam adalah adanya pemimpin (*imamah*), adanya pemerintahan. Pemimpin itu sebutannya bisa khalifah, bisa juga dengan sebutan lain seperti amir, raja, sultan, atau presiden. Pemerintahan juga bentuknya bisa *khilafah*, republik, kerajaan, atau yang lainnya.

Indonesia merupakan contoh negara yang baik, sebab Islam dapat diamalkan, diajarkan, dikembangkan tanpa ada larangan. Justru negara dan Islam memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Jika masih banyak kekurangan model negara seperti Indonesia, tidak diperbaiki, khususnya para pelakunya. Di Indonesia juga masih banyak yang tidak baik, dan tidak sesuai dengan Islam seperti sistem demokrasi yang digunakan. Contohnya demokrasi yang diterapkan satu suara ulama itu sama nilai satu suara penjahat. Ini jelas tidak sesuai dengan Islam.⁵⁴

Selanjutnya, pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Muslih Shabir, M.A. (NU kultural). Menurutnya, bahwa yang dimaksud *khilafah Islamiyah* adalah suatu negara universal, meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik. Artinya, lembaga negara juga sekaligus

⁵⁴Wawancara dengan KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH, *loc.cit.*

lembaga keagamaan. Khalifah selain sebagai pemimpin negara, juga pemimpin agama.⁵⁵

Menurut Muslih Shabir, sebenarnya tidak ada ayat al-Qur'an maupun hadis yang berbicara tentang perintah mendirikan *khilafah*. Ayat maupun hadis yang dijadikan dasar pembentukan *khilafah* sebenarnya berbicara tentang perlunya ada kepemimpinan. Padahal *khilafah* dengan kepemimpinan yang dimaksud al-Qur'an maupun hadis berbeda dengan konsep *khilafah* yang selama ini diperjuangkan oleh kelompok yang menghendaki didirikannya kembali sistem *khilafah*.⁵⁶

Tentang bagaimana bentuk kepemimpinan yang dikehendaki oleh Islam, nash-nash yang ada tidak memberikan aturan yang pasti. Untuk tataran ideal, sistem *khilafah* terutama al-*khilafah* al-rasyidah memang merupakan sistem yang paling baik, ideal, mengingat umat Islam bisa bersatu di bawah kendali seorang khalifah. Namun ini sangat utopis untuk direalisasikan. Sebab, jika diterapkan tatanan dunia yang ada saat ini dengan nation state yang sudah mapan, akan berubah drastis. Negara-negara yang sepakat mendirikan *khilafah* akan berubah menjadi semacam negara bagian (propinsi) saja, karena pemerintahan pusat hanya ada satu di bawah pimpinan khalifah. Yang lebih realistis adalah umat Islam mendirikan lembaga semacam *khilafah* dengan bentuk berbeda, dimodifikasi sesuai dengan tuntutan zaman. Model kepemimpinan dikalangan umat Islam memang sudah sewajarnya berubah. Saat ini, dikalangan negara

⁵⁵Wawancara dengan Prof. Dr. Muslih Shabir, M.A., pada hari Senin, tanggal 12 April 2008, Pukul 10.00-10.45, di Ruang D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walsiongong Semarang.

⁵⁶ *Ibid.*

Islam/berpenduduk mayoritas Islam memang telah dibentuk OKI (Organisasi Konferensi Islam); tetapi fungsi, wewenang dan kewibawaannya belum seperti yang diinginkan. Untuk tidak terlalu banyak membuang energi, OKI yang sudah ada selama ini bisa ditingkatkan fungsi dan peranannya sehingga menjadi lembaga yang mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam.⁵⁷

Bila nama OKI dipandang tidak sesuai jika dikaitkan dengan fungsi dan peranannya yang baru, maka nama itu bisa diganti dengan nama yang mencerminkan adanya persatuan, misalnya Persatuan Negara-negara Islam. Semua negara yang bergabung di dalamnya harus mempunyai komitmen yang sama dan bersedia untuk melaksanakan keputusan dengan konsisten, meskipun mungkin keputusan itu dirasa merugikan, tetapi akan membawa kebaikan bagi dunia Islam.

Bila lembaga itu bisa terwujud, maka dapat dikatakan bahwa umat Islam telah menunaikan kewajiban menggalang persatuan, yang memang diwajibkan oleh Islam, dan mewujudkan kepemimpinan umum yang bertugas menjaga agama dan merealisasikan kepentingan bersama dalam berbagai bidang seperti fungsi *khilafah*. Sebab, jika yang dimaksud *khilafah* seperti masa *Khulafa' al-Rasyidun* sangat sulit sekali terwujud. Pada masa itu wilayah kekuasaan Islam masih sempit. Secara historis pun, pasca *Khulafa' al-Rasyidun* sudah tidak ideal

⁵⁷ *Ibid.*

lagi, karena lebih mendekati kerajaan, meskipun peran dan tanggung jawab penyebaran Islamnya masih berjalan.⁵⁸

Memang ajaran Islam harus diterapkan secara menyeluruh, tetapi tidak harus dengan sistem *khilafah*. Belum tentu dengan sistem *khilafah* berhasil. Bunyi Piagam Jakarta yang dulu pernah diperjuangkan sebenarnya sudah pas. Namun penerapannya harus dengan hikmah, mauidhah, dan dialog. Tidak dipaksakan oleh negara.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI ULAMA NU KOTA SEMARANG

TENTANG SISTEM *KHILAFAH ISLAMIAH*

A. Analisis terhadap Persepsi Ulama NU Kota Semarang tentang Sistem *Khilafah Islamiyah*

Era reformasi telah membuka kembali angin segar terhadap gerakan Islam yang menawarkan formalisasi syari'ah, hingga penegakan *Khilafah Islamiyah*. Fenomena ini diawali dengan munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lengkap dengan gerakan massanya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sangat gencar menawarkan ide dihidupkannya kembali sistem *khilafah*, yaitu sistem pemerintahan Islam dalam skala internasional yang menaungi umat Islam di seluruh dunia.

Ide ini mendapatkan sambutan dari sebagian umat Islam. Indikasinya bisa dilihat dari semakin banyaknya anggota maupun simpatisan HTI seperti diperlihatkan dalam berbagai aksi unjuk rasa yang mampu mengumpulkan ribuan orang. HTI menganggap berbagai permasalahan yang melanda dunia Islam khususnya Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, perusakan lingkungan, moralitas pejabat yang korup, eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa asing (Barat), dan pendidikan yang tertinggal, hanya satu jalan yaitu mewujudkan *Khilafah Islamiyah*. Apalagi saat ini ekonomi global didominasi kapitalis Barat yang membuat rakyat negara berkembang tetap miskin, dan bodoh. Akibatnya, mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan. Cengkraman kapitalisme,

menurut HTI hanya dapat dilawan dengan *khilafah Islamiyah* yang mendorong dan memungkinkan kerja sama antara negara Islam.

Melihat semakin gencarnya wacana *khilafah Islamiyah* yang dikampanyekan HTI, apalagi pada Agustus 2007, HTI berhasil menyelenggarakan Konferensi *Khilafah Islamiyah* (KKI) yang tentunya dapat memompa semangat anggota HTI di sejumlah tempat, membuat NU melalui ketua umumnya, KH. Hasyim Muzadi, resah. Sebab dianggap dapat mempengaruhi sikap politik warga NU yang secara organisatoris telah menegaskan bahwa NKRI berdasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan NU. Bahkan KH. Hasyim Muzadi sampai meminta agar pemerintah melarang HTI karena dianggap dapat membahayakan eksistensi NKRI. Namun demikian, setuju atau tidak, sejalan dengan ketentuan UUD 45 Pasal 28, HTI tidak bisa dilarang, kecuali telah terbukti menimbulkan ketidaktertiban, dan itupun harus melalui proses hukum.¹

Khilafah Islamiyah sendiri selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh kelompok yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun golongan yang berpandangan sekuler. Munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan; ‘apakah kerasulan Muhammad s.a.w. mempunyai kaitan dengan masalah politik’; atau ‘apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik kenegaraan atau pemerintahan’, dan ‘apakah sistem dan bentuk pemerintahan Islam harus selalu berbentuk *khilafah*, atau boleh menggunakan sistem lain disesuaikan dengan kondisi zaman?’

¹Shalahuddin Wahid, ”NU dan *Khilafah Islamiyah*”, dalam Harian *Republika*, 3 September, 2007, hlm. 4.

Munculnya permasalahan tersebut wajar karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang (*qawanin*) yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak, dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Sebuah analisis politik yang dilakukan oleh Alan Samson tentang keterpaduan agama dan politik seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir, merefleksikan hubungan formal antara Islam dan negara. Karenanya, Islam dianggap agama yang memiliki penjelasan paling lengkap tentang hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun, salah seorang tokoh penting Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada batasan antara agama dan politik sebagaimana tidak ada batasan nilai-nilai religi dan nilai-nilai nasionalisme. Menurut Harun, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, dan hampir mayoritas umat Islam Indonesia menyepakatinya.²

Keyakinan sebagian tokoh-tokoh Islam tanah air masa lalu seperti M. Natsir, bahwa Islam mencakup sistem kepercayaan dan politik serta ada hubungan langsung antara Islam dan negara, menurut Fachry Ali merupakan cikal bakal lahirnya Islam politik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma pandangan, sikap dasar dan tingkah laku politik baku organisasi-

²Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 95.

organisasi dan para politisi Islam. Perkembangan Islam politik sendiri di kalangan tokoh-tokoh Islam adalah suatu hal yang wajar, karena setiap perjuangan politik membutuhkan legitimasi ideologis. Kemunculan Islam politik juga sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap kekuatan kolonial dan dominasi Barat. Atau sebagai hasil dari faktor-faktor internal, yaitu dalam bentuk ‘perubahan peta kekuatan politik, melemahnya persaingan ideologi antara kekuatan-kekuatan politik dan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mencoba mendominasi, baik secara ekonomi maupun secara kultural.³

Perkembangan selanjutnya, perubahan-perubahan wacana politik yang terus bergulir baik di tingkat lokal maupun global diharapkan menghasilkan konsep ideal yang ditawarkan ke arah pemikiran yang lebih realistik. Begitu pula dalam diskursus sistem pemerintahan Islam, tentunya diharapkan dapat merumuskan suatu konsep yang ideal, yang tidak hanya rasional-realistis, namun juga tidak keluar dari bingkai ajaran Islam.

Setidaknya gagasan merupakan sebuah sumbangan yang memperkaya khazanah gerakan dan pemikiran politik Islam. Sekaligus sebagai bukti empirik bahwa nilai-nilai keagamaan telah memberi umat Islam suatu landasan berpijak (*a common ground*) untuk berkomunikasi, membangun solidaritas, menumbuhkan komitmen, bekerja sama dan menyusun tujuan bersama di pentas politik.

Diskursus politik Islam yang dilakukan oleh ulama sendiri dalam pembicaraan hubungan agama dan politik mengarah kepada dua tujuan. *Pertama*,

³ *Ibid.*, hlm. 96.

menemukan idealitas Islam tentang politik (melakukan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan ‘apa bentuk negara atau pemerintahan Islam’.

Kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan (menekankan aspek praksis dan substansial), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana isi negara menurut Islam”. Jika pendekatan pertama bertolak dari anggapan bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, maka pendekatan kedua bertolak dari anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, tetapi hanya membawa prinsip-prinsip dasar berupa nilai etika dan moral.⁴

Proses pencarian konsep tentang sistem pemerintahan dalam Islam sendiri berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik-menarik, yaitu tantangan realitas politik yang harus dijawab dan tantangan idealitas agama yang harus dipahami untuk menemukan jawaban. Oleh karena itu, perbedaan konsepsi lebih berada dalam tataran metodologis, yang pada giliran berikutnya menentukan perbedaan substansial pemikiran.

Pendekatan realistik lebih melihat kenyataan-kenyataan yang bersifat obyektif, dan berorientasi pada realitas politik. Sedangkan pendekatan idealistik cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam yang ideal meskipun belum pernah terwujud dalam praktek nyata.

⁴M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 50-52.

Pandangan dan sikap ulama NU Kota Semarang, yang menolak *khilafah Islamiyah* dihidupkan kembali, rupanya menggunakan pendekatan realistik yaitu dengan melihat realitas politik secara obyektif. Seperti dikemukakan oleh salah seorang ulama NU Kota Semarang, KH. Ubaidillah Shadaqoh, SH, bahwa sistem *khilafah* merupakan sistem lama meskipun ideal, tetapi tidak mungkin dapat diterapkan lagi. Tidak mungkin dengan kondisi politik sekarang di mana negara-negara Islam maupun yang berpendudukan mayoritas Islam sudah sangat mapan eksistensinya dan dijamin oleh PBB, akan dengan suka rela meleburkan diri ke dalam negara lain. Harus realistis, Indonesia dengan Malaysia saja tidak mau akur, apalagi bergabung.⁵ Prof. Dr. Muslih Shabir, M.A., memandang bahwa sistem *khilafah* ideal, tetapi utopis atau sesuatu yang sulit diwujudkan dalam dunia nyata.⁶

Ulama NU dengan visi kebangsaannya memang bersikap tegas menolak gagasan negara Islam, formalisasi syari'ah, apalagi mendirikan *khilafah Islamiyah*. Ulama NU berpandangan bahwa syari'at Islam itu untuk dilaksanakan oleh umat Islam dan tidak untuk dilegalformalkan dalam kehidupan kenegaraan, apalagi melalui *khilafah* yang tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. NU justru memperjuangkan tegaknya tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syari'at*) seperti keadilan, kemaslahatan, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Pada konteks inilah NU hendak tampil dengan suatu pendekatan yang dapat disebut sebagai pendekatan substantivistik. Pendekatan ini cenderung

⁵Wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqoh, SH, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2008, Pukul 13.30-14.15 di rumahnya.

⁶Wawancara dengan Prof. Dr. Muslih Shabir, M.A., pada hari Senin, tanggal 12 April 2008, Pukul 10.00-10.45, di Ruang D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walsongo Semarang.

menekankan isi daripada kulit (formal), dengan memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisi negara Indonesia dengan etika dan moralitas agama dan menjadikannya ruh dalam setiap pembangunan.

Menurut hemat penulis, dalam konteks politik NKRI, pandangan ulama NU Kota Semarang yang menolak wacana pendirian *Khilafah Islamiyah*, cukup relevan. Sebab Indonesia dengan Pancasila yang menurut NU memiliki kesesuaian dengan Islam, memiliki banyak potensi untuk mewujudkan pola simbiotik-mutualistik dengan diakomodirnya nilai Islam dalam Pancasila dan dijadikannya ruh dalam pembangunan. Pola hubungan simbiotik-mutualistik sendiri menurut Din Syamsuddin merupakan hubungan saling menguntungkan secara timbal balik antara Islam dan negara.⁷

Persoalannya lebih pada implementasi yang kurang maksimal terhadap sebuah sistem yang sudah ada. Pandangan ulama NU tersebut sangat berharga untuk dapat dijadikan masukan terhadap perkembangan bangsa Indonesia selanjutnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kesejahteraan.

Harus diakui, selama ini masih terjadi *gap* antara jaminan konstitusional negara terhadap nilai-nilai Islam dengan kemauan dan kemampuan pemegang kebijakan dalam mengimplementasikannya. Kualitas implementasi nilai-nilai dan pesan Islam sangat rendah. Beberapa prinsip moralitas Islam seperti pemerataan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan tidak menjelma dalam kenyataan. Nilai-nilai Islam juga masih terkesan sangat formalistik, namun tidak mengikat. Sebagai contoh, meskipun para pejabat sebelum memegang jabatannya disumpah

⁷M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 60.

dengan cara-cara Islam, dengan nama Allah dan di bawah al-Qur'an, namun sumpah tersebut tidak mengikat sama sekali, mereka tetap saja korupsi, dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, masih ada kendala dalam aktualisasi peran agama dalam proses perubahan sosial. Penekanan lambang-lambang keagamaan dalam kehidupan politik, masih hanya menampilkan politisasi agama dan menguatkan solidaritas keagamaan yang sangat terbatas. Nilai-nilai agama kerap kehilangan fungsinya dalam mengatur kehidupan sosial dan politik.

B. Nalar Epistemologis yang Digunakan Ulama NU Kota Semarang dalam Menolak Sistem *Khilafah Islamiyah*

Sejarah mencatat, NU sejak dulu hingga sekarang tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Para ulama NU seperti ulama NU Kota Semarang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan di dalam ajaran Islam.

Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ia tidak meninggalkan pesan apapun tentang bagaimana cara memilih kepala negara. Pemilihan kepala negara dan banyak lagi tentang kenegaraan tidak ditentukan dalam Islam.

Tentang penyelenggaraan pemerintahan, menurut ulama NU, semua sistem dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam di setiap tempat. Sejak dahulu NU tidak memiliki keinginan untuk mendirikan negara yang didasarkan pada Islam.

Sebagai ulama yang notabenenya ahli ilmu agama, ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilafah* tentu dilandasi oleh nalar epistemologis keagamaan sebagai argumentasi. Nalar epistemologis ulama NU

dalam beragama lebih mementingkan tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), dari pada ketentuan-ketentuan harfiah syari'at Islam. *Maqashid al-syari'ah* merupakan semangat dasar terbentuknya syari'at yang ditujukan untuk mengedepankan kepentingan umat manusia secara mutlak dan menyeluruh, tanpa mempertimbangkan masalah perbedaan keyakinan, ideologi, etnis, dan kelompok. Dengan pertimbangan ini, tidak terlalu terbelenggu dengan teks. Singkatnya, yang menjadi pegangan adalah kepentingan umat manusia, atau *maslahat* harus didahulukan, dan menghindari *madharat*.

Penegakan *Khilafah Islamiyah* justru akan banyak menimbulkan *madharat*, menurut KH. Siroj Khudlari. Semua tatanan yang sudah ada di negara-negara muslim akan dirombak, dan pasti akan menimbulkan kekacauan.⁸ Menurut Prof. Dr. Muslih Shabir, M.A., Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan *khilafah Islamiyah*. Yang diperintahkan adalah adanya imamah (pemimpin), apapun bentuknya.⁹

Sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat Islam sesudah Muhammad Rasulullah wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti Nabi yang akan memimpin umat dalam kapasitas sebagai kepala negara, atau yang lazim disebut persoalan *imamah*. Sedangkan al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai acuan utama tidak sedikitpun menyiratkan petunjuk pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk

⁸Wawancara dengan KH. Siroj Khudlari, pada hari Minggu, 20 April, 2008 Pukul 08.15-08.55 di rumahnya.

⁹Wawancara dengan Prof. Dr. Muslih Shabir, M.A., pada pada hari Senin, tanggal 12 April 2008, Pukul 10.00-10.45, di Ruang D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walsiongo Semarang.

pemerintahan serta pembentukannya.¹⁰ Sehingga tidak mengherankan jika dalam pentas sejarah umat Islam pasca Nabi sampai abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk *khilafah* yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhis absolut.

Keragaman dalam praktek mencuatkan pula konsep dan pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terkait dengan kedudukan Nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik.

Demikian juga yang dilakukan ulama NU Kota Semarang dalam menafsirkan ajaran Islam. Ulama NU Kota Semarang memandang tidak ada satu pun ayat al-Qur'an maupun Hadis yang mewajibkan mendirikan *Khilafah Islamiyah*. Yang diwajibkan adalah mendirikan *imamah* (kepemimpinan), dan *imamah* berbeda dengan *khilafah*. Apalagi NU telah menjadikan paham ahlussunah waljamaah sebagai dasar teologi (akidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sebagai pegangan dalam fiqh, meskipun kenyataan kesehariannya para ulama NU hanya menggunakan fiqh yang bersumber dari Mazhab Syafi'i.

Pola keagamaan yang telah berlangsung selama ini sebenarnya telah memenuhi keperluan untuk menjalankan syari'at Islam. Islam cukup disosialisasikan dan diajarkan melalui pendidikan yang persuasif, tanpa didasari unsur paksaan. Ulama NU Kota Semarang lebih setuju apabila ajaran Islam

¹⁰J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. ix.

cukup menjadi sinar bagi aturan-aturan, norma masyarakat, hukum publik, sistem budaya, dan adat-istiadat. Jika ajaran Islam dipaksakan secara formalistik, maka Islam akan sangat rentan.¹¹

Namun demikian, karena pandangan tersebut merupakan pandangan dan sikap politik, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari faktor politis yang menjadi pertimbangan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarahnya NU selalu memposisikan diri tidak ingin berhadapan dengan pemerintah. Bahkan berupaya mendukung dan mengakui eksistensi semua pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai keputusan NU yang selalu dalam posisi mendukung pemerintahan yang ada.

Ketika Indonesia belum merdeka, pada Mukdamar NU tahun 1930 di Banjarmasin, NU juga tidak mempermasalahkan Negara Hindia Belanda di bawah kekuasaan non muslim, asalkan dapat memberi kesempatan warga NU menjalankan ketentuan syari'at Islam.¹² Itu artinya, bentuk Negara Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda, bukan masalah bagi NU.

Setelah Indonesia merdeka dan NU bergabung dengan Masyumi, NU ikut memperjuangkan negara Islam dan Piagam Jakarta. Meskipun sikap ini menurut Ahmad Baso seperti dikutip Shalahuddin Wahid dipandang wajar ketika itu, sebab Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaan dan bebas membahas

¹¹Wawancara dengan KH. Ahmad Hadlor Ihsan, pada hari Jumat, 18 April 2008, Pukul 16-30-17.15 di Kantor PCNU Kota Semarang.

¹²Said Agil Siradj, "NU, Aswaja, dan Visi Kebangsaan", dalam Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 2007, hlm. 2.

negara semacam apa yang didirikan. Negara Islam ketika itu juga berkonotasi positif.¹³

Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah Soeharto menerapkan asas tunggal Pancasila, NU pun menerimanya. Bahkan setelah Munas Alim Ulama NU pada 1983, NU menyetujui dokumen hubungan Islam dan Pancasila, dan NU menyatakan NKRI berdasarkan Pancasila merupakan bentuk final.¹⁴

Keputusan ini dipertegas lagi dan diperkuat dalam Keputusan Mukhtar NU ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004 bahwa NU telah menegaskan NKRI dengan dasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan NU.¹⁵

Sebenarnya, di Indonesia sendiri pernah ada organisasi Komite *Khilafah* Indonesia (KKI). Pada saat Kamal Attaturk menghapuskan *Khilafah* Turki Utsmani, banyak ulama Indonesia juga yang menentanginya. Namun setelah negara sekuler berhasil didirikan oleh Kamal Attaturk di Turki, KKI pun bubar dengan sendirinya karena *khilafah* dipandang tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Sejak itu pula, KKI kehilangan momentumnya, dan gagasan *khilafah* tidak menjadi wacana arus utama umat Islam Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah.

Karena sikapnya yang cenderung tidak ingin berhadapan dengan pemerintah inilah para pengamat Islam Barat dan kaum Islam modernis menilai

¹³Shalahuddin Wahid, *loc.cit.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Lajnah Bahtsul Masa'il PBNU, *Hasil-hasil Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2004, hlm. 62-63.

NU sebagai kelompok oportunis. NU gampang mengubah sikap politik, asal kepentingan agamanya tak terganggu.¹⁶

Menurut fakta sejarah pula, peran politik NU berada di titik puncak pada kurun waktu 1952 hingga 1967. Sejak NU keluar dari Masyumi di tahun 1952 dan bergabung dengan partai nasionalis dan partai kiri di dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, cap oportunisme terus dilekatkan pada NU. Sikap politik NU yang dinilai luar biasa oportunis terjadi pada masa transisi menuju Demokrasi Terpimpin antara 1957 dan 1960. Saat itu, NU menolak, kemudian menerima usulan Presiden Soekarno dan tentara untuk tidak lagi memberlakukan demokrasi konstitusional. Pembalikan sikap lainnya adalah saat NU memutuskan meninggalkan Soekarno dan mendukung Soeharto pada tahun 1967. NU juga pernah bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari Nasakom, sebelum kemudian turut memainkan peran besar dalam upaya membubarkan komunis.¹⁷

Namun demikian, bagi NU sikap yang dipandang oportunis ini justru dirasakan sebagai bukti keluwesan yang memang merupakan ciri implementasi dari sikap politik yang moderat. Berulang kali tampak NU memilih mengenyampingkan masalah untuk meredam ketegangan politik. Ini pula yang tampaknya ingin diucapkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika mengatakan hubungannya dengan Megawati secara pribadi sudah finish, tapi jika menyangkut kepentingan yang lebih luas, ia mau berkompromi dengan siapapun.

¹⁶ Fransisca R. Susanti, "Zigzag Gus Dur; Oportunisme NU, Mimpi Para Demokrat", dalam *Sinar Harapan*, Edisi, Selasa, 11 Mei 2004, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*

Menurut analisis pengamat NU Greg Fealy dalam bukunya *Ijtihad Politik Ulama*, bahwa dalam doktrin politiknya, NU sangat bertumpu pada tradisi "memilih jalan damai". Tradisi ini dibakukan melalui prinsip-prinsip yurisprudensi dan kaidah yang menganjurkan meminimalisir risiko, keluwesan, pengutamaan azas manfaat dan menghindari hal-hal yang ekstrem.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa nalar epistimologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *Khilafah Islamiyah* adalah bahwa dalam beragama tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) lebih diprioritaskan dari pada ketentuan-ketentuan harfiah syari'at. *Maqashid al-syari'ah* merupakan semangat dasar terbentuknya syari'at yang mengedepankan kemaslahatan dan menghindari *madharat*. Namun demikian, sikap ulama NU tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari faktor politis untuk tidak berhadapan/bersebrangan dengan pemerintah sepanjang kepentingan keagamaan NU tidak terganggu. Ulama NU Kota Semarang memandang bahwa pola keagamaan yang telah berlangsung selama ini di Indonesia telah memenuhi keperluan untuk menjalankan syari'at Islam.

¹⁸Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LkiS, 1998, hlm. 70-74.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan per bab yang saling terkait di bawah judul “PERSEPSI ULAMA NU TENTANG SISTEM *KHILAFAH*; Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang”, dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan:

1. Menurut ulama NU Kota Semarang *khilafah* merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama. Sistem *khilafah* tersebut tidak pas diterapkan di Indonesia, bahkan sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang, sebab negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim sudah mapan dengan *nation state*. Meskipun sistem *khilafah* ideal karena dapat mempersatukan dunia Islam, tetapi sulit diwujudkan atau sebagai konsep ideal utopis. Menurut ulama NU Kota Semarang, Islam tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem *khilafah*. Tidak terdapat satu pun ayat al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan *khilafah*. Yang diperintahkan oleh Islam adalah mendirikan *imamah* (kepemimpinan), dan *imamah* bentuknya tidak harus *khilafah*, tetapi disesuaikan dengan situasi dan perkembangan politik yang ada sehingga relevan.

3. Nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak didirikannya sistem *Khilafah Islamiyah* bahwa dalam menjalankan ajaran Islam yang lebih dipentingkan adalah melihat tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), dari pada ketentuan-ketentuan harfiah syari'at Islam. *Maqashid al-syari'ah* merupakan semangat dasar terbentuknya syari'at yang ditujukan untuk mengedepankan *maslahat*, dan menghindari *madharat*. Penegakan *Khilafah Islamiyah* justru akan banyak menimbulkan *madharat*. Semua tatanan yang sudah ada di negara-negara muslim akan dirombak, dan pasti akan menimbulkan kekacauan. Pola keagamaan yang telah berlangsung selama ini di Indonesia telah memenuhi keperluan untuk menjalankan syari'at Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian terhadap ”PERSEPSI ULAMA NU TENTANG SISTEM *KHILAFAH*; Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang”, penulis mengajukan saran:

1. Kepada ulama NU Kota Semarang khususnya dan ulama NU pada umumnya, sekiranya perlu merumuskan suatu konsep persatuan umat Islam meskipun bukan dalam bentuk *khilafah*, agar umat Islam dapat terlepas dari hegemoni Barat, mengejar ketertinggalan, meningkatkan solidaritas di antara sesama umat Islam sedunia, dan umat Islam dapat tampil kembali memimpin peradaban dunia.

2. Kepada seluruh elemen yang menghendaki berdirinya *khilafah Islamiyah*, hendaknya dapat melakukannya dengan cara damai. Dialog lebih dikedepankan agar dapat meyakinkan pihak-pihak yang menolak.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis merasa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan keterbatasan dan kekurangan penulis sendiri. Kritik dan saran sangat penulis harapkan, agar dapat menghasilkan karya yang lebih sempurna di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya khususnya bagi penulis. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussani, Humaidi, *5 Rais Amm NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hazm, 2002.
- Al-Ishfahani, Raghib, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th.
- Al-Maududi, Abu A'la, "Teori Politik Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Penyunting), *Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. V, 1995.
- _____, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. M. al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad Habib al-Bashri, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Surabaya: Syirkah Bngil Indah, t.th.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Umah, 1996.
- Al-Najjar, Abdul Madjid, *Khilafah, Tinjauan Wahyu dan Akal*, Terj. Forum Komunikasi Al-Ummah, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Rais, Dhiyauddin, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Islam, Ali Abdur Raziq*, Terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Salus, Ali, *Imamah & Khilafah dalam Tinjauan Syari'*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1997.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surakarta: tanpa penerbit, 1985.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniah*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

- Azzam, Abdullah, *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Terj. Abdurrahman, Solo: Pustaka Al-Alaq, 1994.
- Bruinessen, Martin Van, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1989.
- Choirie, Effendi, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Conolly, Peter, *Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Damam, Rozikin, *Membidik NU, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Elwa, Mohamed S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thajib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LkiS, 1998.
- Feillard, Andree, *NU vis a Bis Negara*, Terj. Lesmana, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Haikal, Muhammad Husein, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993.
- Hanafi, Ridho Imawan, “NU dan Penghidmatan Kebangsaan”, dalam *Media Indonesia*, Edisi, Jumat, 1 Februari 2008.
- Hasbalah, Ali, *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, Mesir: Daar al-Ma’arif, t.th.
- Http://www.Hizbut-Tahrir.Or.Id., diakses Tanggal 15 Februari 2008, pukul 20.10 WIB.
- Http://www.nu.or.id., diakses Tanggal 20 Februari 2008, pukul 19.20 WIB.
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung, Semarang: Lajnah Ta’lif Wanasir, t.th.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II, 2000.
- Lajnah Bahtsul Masa’il PBNU, *Hasil-hasil Mukmatar XXXI Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2004.

- Lajnah Bahtsul Masa'il PBNU, *Hasil-hasil Mukmtar XXXI Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2004.
- Lampiran SK PBNU Nomor 176/A.II.04.d/12/2006 tentang Susunan PCNU Kota Semarang Masa Jabatan 2006-2011.
- Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama*, Edisi II, Semarang: LP. Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002.
- Ma'sum, Syaifullah, *Menapak Jejak Mengenal Watak Biografi 126 Tokoh NU*, Jakarta: Yayasan Sarifuddin Zuhri, 1994.
- Mahfudh, M.A. Sahal, "Kata Pengantar", dalam M. Imaduddin Rahmat, (Ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002.
- _____, *Nuansa Fiqh Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mudhofir, M., "Artikulasi Politik NU Pasca Khittah 1926; Studi tentang Format Perpolitikan NU Sejak Mukmtar Situbondo 1984 Hingga Mukmtar Cipasung 1994", dalam *Jurnal Walisongo*, Edisi 14, 1999.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Mukharom, "Pandangan Ulama NU Kota Semarang tentang Wakaf Tunai (*Cash Wakaf*)", Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007, td.
- Muslim bin al-Hajaj, Abi Husein, *Shahih Muslim*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hajm, 2002.
- Muzadi, A. Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- NU Online, "Hasyim Ingatkan PKB Agar Tak Lupakan Visi Perjuangan NU", dalam *Warta*, <http://www.nu.or.id>. Diakses tanggal 27 Juni 2008, Jam 08.00. WIB.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukmtar NU ke-27 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, 1986.
- _____, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, Jakarta: Lajnah Ta'lif Wannashr, 1998.

- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Raziq, Ali Abdul, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Ringkasan Eksekutif Rencana Program Kerja PCNU Kota Semarang Masa Khidmat 2006-2011.
- Salim, Abd. Mu'in, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Setiawan, Zudi, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 20007.
- Shabir, Muslih, "Khilafah Islamiyah, dalam *Suara Merdeka*, Semarang, Kamis 21 Februari 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lintera Hati, Cet. VIII, 2007.
- Siradj, Said Agil, "NU, Aswaja, dan Visi Kebangsaan", dalam Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 2007.
- Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Soyomukti, Nurani, "NU dan Visi Kebangsaan di Era Neoliberal", dalam *Majalah Perspektif*, Edisi 142, Desember 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 1997.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Susanti, Fransisca R., "Zigzag Gus Dur; Oportunisme NU, Mimpi Para Demokrat", dalam *Sinar Harapan*, Edisi, Selasa, 11 Mei 2004.
- Syakur, Abdul, "Meneguhkan Sikap Politik NU", dalam *Majalah Arwaniyah*, Edisi VI, Juni 2008.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H.

Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU, Apa NU Dibodohi*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002.

Umam, Khoirul, *Perilaku Politik Kyai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Wahid, Shalahuddin, "NU dan Khilafah Islamiyah", dalam Harian *Republika*, 3 September, 2007.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Miftahul Ilmi
Tempat / tgl. Lahir : Demak, 18 Agustus 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Kenduren Rt 02 Rw 04 Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak

2. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI NU Salafiyah Kenduren-Wedung -Demak Lulus Tahun 1997
2. MTs NU Salafiyah kenduren-Wedung- Demak Lulus Tahun 2000
3. MAN Lasem Rembang Lulus Tahun 2003
4. IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah Lulus Tahun 2008

3. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. PP Darut Tauhid Al Alawiyah Mutih Kulon-Wedung-Demak
2. PP An Nur Lasem Rembang

4. PENGALAMAN ORGANISASI

1. DPMF Fakultas Syari'ah
2. BEMJ Siyasah Jinayah
3. HMI Komisariat Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
4. HMI Cabang Semarang
5. LSM HUMANIKA (Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan Dan Kemanusiaan) Jawa Tengah
6. Ketum Umum GPI (Gerakan Pemuda Islam) Kota Semarang

Semarang, 04 Agustus 2008
Hormat saya

Miftahul ilmi